

**ANALISIS EKONOMI DAN POTENSI
PENGEMBANGAN WILAYAH
KECAMATAN GEMOLONG,
KABUPATEN SRAGEN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Wilayah



Oleh :

**ARIS MUNANDAR
S4209005**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2010**

commit to user

**ANALISIS EKONOMI DAN POTENSI
PENGEMBANGAN WILAYAH
KECAMATAN GEMOLONG,
KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh :

ARIS MUNANDAR
S4209005

Telah disetujui oleh dosen pembimbing :

Pada Hari : Jumat tanggal : 8-12-2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Tulus Haryono, M.E.
NIP.19550801 1981 1 006

Pembimbing II



Izza Mafruhah, SE, M.Si
NIP.19720323 200212 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Universitas Sebelas Maret



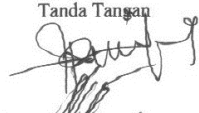

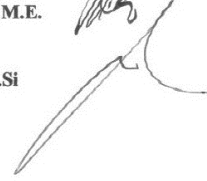

Dr. J.J. Sarungu, M.S
NIP. 19510701 198010 1 001

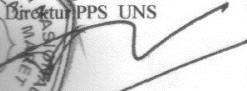
**ANALISIS EKONOMI DAN POTENSI
PENGEMBANGAN WILAYAH
KECAMATAN GEMOLONG,
KABUPATEN SRAGEN**

Disusun oleh :

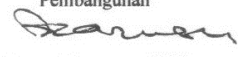
**ARIS MUNANDAR
S4209005**

Telah disetujui oleh Tim Penguji
Pada Tanggal :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Evi Gravitiani, M.Si	
Pembimbing Utama	Prof. Dr. Tulus Haryono, M.E.	
Pembimbing Pendamping	Izza Mafruhah, SE, M.Si	

Mengetahui
Direktur PPS UNS

Prof. Dr. Suranto, M.Sc, Ph.D
19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan


Dr. J.J. Sarungu, M.S
NIP19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARIS MUNANDAR
NIM : S4209005
Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan Daerah dan Studi Perencanaan Wilayah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya

Surakarta, 8 Desember 2010
Tertanda,

ARIS MUNANDAR


SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi Kecamatan Gemolong jika ditinjau dari aspek ekonomi dengan tetap mempertimbangkan aspek perencanaan wilayah sebagai hinterland Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah data-data primair maupun data-data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur pemerintahan maupun dengan masyarakat serta data-data dari instansi pemerintah, data-data tersebut terutama tahun 2006 sampai dengan 2009.

Analisis-analisis yang digunakan merupakan kompilasi dari ilmu ekonomi dan perencanaan wilayah, berdasarkan identifikasi dan analisis dapat diketahui bahwa Kecamatan Gemolong mempunyai potensi yang sangat besar terutama sekali letak geografis yang berada di persimpangan antara Sragen-Boyolali dan Grobogan-Solo dengan jarak yang relatif dekat, Gemolong dapat diklasifikasikan dalam ordo II dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Sragen, sehingga Gemolong pantas memiliki pelayanan sedang yang artinya tentu harus ada pendelegasian kewenangan kabupaten yang dilimpahkan ke Kecamatan Gemolong dengan dilandasi payung hukum yang jelas, terutama sekali pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijin Usaha perusahaan-perusahaan kecil/ home industri, ijin gangguan, ijin pendirian warung, ijin keramaian, Ijin Penggalan Galian C Secara Tradisional.

Secara ekonomi ada separo sektor di Kecamatan Gemolong yang basis, dan separo sisanya masuk dalam non basis, sektor-sektor non basis ini harus lebih dikembangkan seperti sektor pertanian yang selalu menurun karena memang sumber daya air permukaan yang kurang mendukung serta kurangnya jaringan irigasi sehingga kedepannya perlu dipikirkan bagaimana mengelola sektor pertanian berbasis hortikultura atau perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi sampai ke pemasarannya, sektor pertambangan agar ditingkatkan dari hanya menggali diubah menjadi ke pengolah bahan galian sehingga ada peningkatan nilai tambah dari hasil bahan galian yang diambil, untuk meningkatkan transportasi perlu dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas jalan kolektor maupun antar wilayah/ kecamatan terhubung dengan jalan arteri primer maupun arteri sekunder, sehingga produksi olahan dapat terkirim dengan lancar, atau secara umum akan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari nilai tambah yang dihasilkan. Sedangkan sektor-sektor yang sudah basis agar terus ditingkatkan dengan tetap mengacu pada standar perijinan dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Ibu Kota Kecamatan Gemolong maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

ABSTRACT

The objective of the research is to know the potential Gemolong Sub District observed from the economic point of view by considering the planning aspect of its territory as the hinterland of Sragen regency. The data employed in this research are classified into two groups, the main data and supporting data. The supporting data are collected by interviewing the government apparatus society. They are also taken from the data collected by the government agencies since 2006 to 2009.

In doing the analysis of the formulated problem, the researcher combines the economics with planning. Result shows that Gemolong sub district has great potential, especially for its geographical location between Sragen – Boyolali intersection and Grobogan – Solo intersection. Gemolong sub district can be classified into second order of the hierarchy of Sragen region which it deserves to apply the average category of services means that the government of Sragen Regency should delegate the authority of public service to Gemolong sub district, especially dealing with the citizenship card, residency card, birth certificate, license for home industry, license for stalls, etc.

From the economic point of view, parts of the sector in Gemolong are basic sectors whereas the other parts are non-basic ones. These non-basic sectors need to develop. For example: the agriculture sector production is declining because the water resources are not sufficient for cultivation. Therefore, further it should be planned how to develop the products of horticulture and how to market them. Related to the mining sector, it should be changed the paradigm of taking out the mine product to processing to get increase their value added. Related to the means of transportation, the government should build adequate connecting streets in order that the produce goods can be distributed well and finally raise the income of the society. Whereas the established basic sector need to be increased by referring to the standard of licensing of Gemolong sub district urban planning and regional district urban planning.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas perkenannya, dalam penulisan tesis yang berjudul “Analisis Potensi Ekonomi dan Kendala Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen” dalam rangka menempuh derajat Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan dapat terselesaikan., tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu menyelesaikan penulisan tesis ini kepada:

1. Bapak Profesor. Dr. Tulus Haryono, SE, MEk. dan Ibu Izza Mafruah, SE, MSi selaku dosen pembimbing pertama dan kedua yang telah berkenan membantu, membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Seluruh dosen dan staf sekretariat Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Surakarta serta teman-teman mahasiswa angkatan X yang telah banyak membantu penulis selama melaksanakan studi;
3. Istriku tercinta, Titik Zuriati dan anakku tersayang Nurul Ulfa dan Dary Malik, yang selalu memberi semangat, do'a, perhatian dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini
4. Seluruh unsur pimpinan dan staf DPPKAD, yang telah memberikan kesempatan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih kurang sempurna karena keterbatasan waktu serta kemampuan yang ada. Oleh karena itu penulis

sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan pada penulisan topik yang sama di masa yang akan datang.

Surakarta, Desember 2010

Penulis,



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
SARI	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 . Kajian Teoritis	8
2.1.1 Pembangunan ekonomi daerah	9
2.1.2 Teori basis ekonomi.....	9
2.2. Kajian Empiris	10
2.2.1 RTRW Kabupaten Sragen tahun 2009 - 2029	10

commit to user

2.2.2 Rencana Pembagian PKL Kabupaten Sragen	12
2.2.3 Rencana Fungsi Pusat Kegiatan dan Pengembangan Kawasan	13
2.2.4 RUTRK-IKK Gemolong Th 2004 – 2014.....	14
2.2.5 Identifikasi Sektor-sektor Unggulan di Jateng.....	15
2.2.6 Identifikasi Sektor Potensial Perekonomian Kab. Merauke.....	17
2.2.7 Kecamatan Pusat Pertumbuhan.....	18
2.2.8 Kesenjangan Antar Wilayah.....	19
2.2.9 Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah.....	21
2.3. Kerangka Pemikiran.....	23
2.4. Landasan Teori.....	24
2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.4.2 Perubahan Struktur Ekonomi.....	26
2.4.3 Menentukan Sektor Potensi Ekonomi.....	27
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
3.2. Unit Analisis.....	28
3.2. Teknik Penarikan Sample.....	28
3.4. Sumber dan Jenis Data.....	29
3.4.1. Sumber Data.....	29
3.4.2. Jenis Data.....	29
3.5. Metode Analisis.....	30
3.5.1. Jarak Terdekat.....	30
3.5.2. Pola Permukiman.....	31

commit to user

3.5.3. Skalogram.....	32
3.5.4. Location Quotions.....	33
3.5.5. Shift Share.....	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1.Pembahasan.....	40
4.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	40
4.1.2. Tata Ruang Kecamatan Gemolong.....	46
4.1.2.1. Kedudukan Kota Dalam Konstelasi Regional.....	47
4.1.2.2. Hubungan Kota Dengan Wilayah Sekitar.....	48
4.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen.....	50
4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Gemolong.....	57
4.2. Hasil Analisis Data dan Pembahasan.....	62
4.2.1. Analsisi Jarak Terdekat.....	62
4.2.2. Analisis Pola Permukiman.....	66
4.2.3. Analisis Skalogram.....	69
4.2.4. Analisis Locations Qoutions.....	71
4.2.5. Anallisis Shift Share.....	74
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Uraian Tabel	Halaman
2.1.	Hirarki Pusat-Pusal Pelayanan Wilayah Sragen.....	11
2.2.	Hirarki Kota dan Fungsi Pusat Kegiatan Dan Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten.....	13
4.3.1	PDRB Kabupaten Sragen Tahun 2006 – 2009.....	52
4.3.4	Distribusi PDRB Kabupaten Sragen tahun 2009.....	54
4.3.7	Distribusi Prosentase Sektor Dominan PDRB Kabupaten Sragen Tahun 2008 – 2009.....	56
4.3.8	Distribusi Prosentase Kelompok Sektor PDRB Kabupaten Sragen Tahun 2008 -2009.....	57
4.4.1	PDRB Kecamatan Gemolong Tahun 2009.....	59
4.4.2	Distribusi dan pertumbuhan PDRB Kecamatan Gemolong Tahun 2009.....	61
4.2.1	Jarak Antar Wilayah.....	63
4.2.4	Analisis Locations Quotins Kecamatan Gemolong Tahun 2005 -2009.....	70
4.2.5	Analisis shift Share Kecamatan Gemolong.....	74

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Uraian Gambar	Hal
Gambar 1	Peta Administrasi Kecamatan Gemolong.....	5
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.2.1	Hubungan Hirarki Antar Wilayah Kota.....	50



commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Uraian Lampiran	Hal
Lampiran 1	PDRB Kabupaten Sragen Menurut Harga Berlaku Tahun 2006- 2009.....	Halaman 80
Lampiran 2	PDRB Kabupaten Sragen Menurut Harga Konstan Tahun 2006- 2009.....	Halaman 81
Lampiran 3	Distribusi Prosentase PDRB Kecamatan terhadap Total PDRB dirinci Perkecamatan Tahun 2009 Menurut Harga Berlaku.....	Halaman 82
Lampiran 4	Distribusi Prosentase PDRB Kecamatan terhadap Total PDRB dirinci Perkecamatan Tahun 2009 Menurut Harga Konstan.....	Halaman 83
Lampiran 5	Rekapitulasi PDRB Kabupaten Sragen Dirinci Perkecamatan Tahun 2009 Menurut Harga Berlaku.....	Halaman 84
Lampiran 6	Rekapitulasi PDRB Kabupaten Sragen Dirinci Perkecamatan Tahun 2009 Menurut Harga Konstan.....	Halaman 85
Lampiran 7	Analisis Pola Permukiman.....	Halaman 86
Lampiran 8	Analisis Skalogram.....	Halaman 87
Lampiran 9	Analisis Locations Quotions.....	Halaman 88
Lamp. 10	Analisis Shift Share	Halaman 90

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pertimbangan atas upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, salah satu indikator utama untuk melihat/mengukur berhasil tidaknya suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, BBM, sarana dan prasarana perhubungan/transportasi dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mengarah pada tingkat kepuasan masyarakat, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk dapat mencapai hal itu, konsep pembangunan sejak dari perencanaan harus

commit to user

diarahkan pada perwujudan pusat-pusat pelayanan secara adil dan merata dan untuk itu diperlukan teknik-teknik perencanaan pembangunan.

Analisis fungsi wilayah, atau sering disebut juga dengan analisis fungsi, adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut, dengan menggunakan alat analisis fungsi akan diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah, sehingga akan diketahui penumpukan fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah tersebar secara merata, apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Fungsi di sini adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*customer*).

Dalam melaksanakan analisis fungsi, perencanaan hendaknya tidak terfokus pada keadaan suatu obyek secara fisik saja, melainkan harus benar-benar dilihat dan dianalisis pemanfaatannya, apakah dapat berfungsi atau tidak. Jika masih berfungsi, apakah sesuai untuk peruntukannya atau telah berubah fungsi. Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan dalam analisis fungsi, sehingga suatu wilayah

pemukiman, yakni kekuatan yang menyangkut fasilitas pelayanan yang dimilikinya.

Berbeda dengan analisis demografis (kependudukan), yang memberikan tambahan wawasan kepada perencana mengenai kecenderungan pembangunan pola-pola pemukiman yang dilihat berdasarkan data-data penduduk (yang sangat sedikit bahkan kurang memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi) analisis fungsi memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi aglomerasi (penumpukkan).

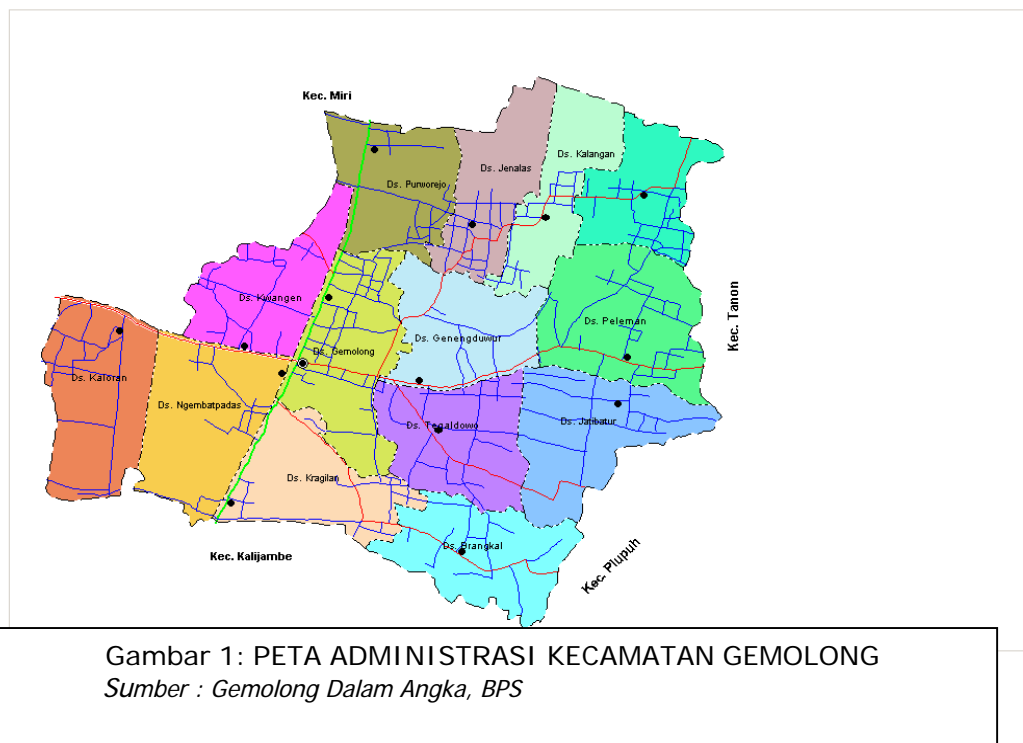
Ekonomi aglomerasi, menurut Jenssen (1998), memiliki peran penting dalam pembangunan, seperti diungkapkannya sebagai berikut: *Anglomeration economies play an important role in development. The extensive range of services and the concentration of economic activities stimulates and exchange. The economic specialization increases efficiency and income. A good acces to market outlets, to the financial system and to a broader labour market reduces production costs and increases income and finally the welfare.*” (Ekonomi penumpukkan berperan penting dalam pembangunan, banyaknya pelayanan dan konsentrasi kegiatan ekonomi merangsang informasi dan pertukaran. Spesialisasi ekonomi meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akses yang baik terhadap pasar, sistem keuangan dan

commit to user

pasar tenaga kerja yang lebih luas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan serta akhirnya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses Perencanaan Daerah, analisis fungsi merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka-kerangka umum seperti tersebut di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan, sehingga memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah.

Kecamatan Gemolong terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Sragen pada jarak 37 km (20 km dari Kota Solo) dengan ketinggian 128 meter dari permukaan air laut. Beriklim tropis dan temperatur sedang. Batas wilayah Kecamatan Gemolong sebelah utara adalah wilayah Kecamatan Sumberlawang, sebelah timur wilayah Kecamatan Tanon, sebelah selatan wilayah Kecamatan Kalijambe , dan sebelah barat wilayah Kecamatan Miri seperti gambar dibawah ini



Jumlah penduduk Kecamatan Gemolong sampai akhir tahun 2009 sebesar 47.398 jiwa terdiri dari 23.456 laki-laki dan 23.942 perempuan. Kepadatan penduduk 1.178 jiwa/km² dan sex ratio sebesar 976,14. Dari 14 desa di wilayah Kecamatan Gemolong, Desa Gemolong memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 3.315 jiwa/km². Sebaliknya, Desa Nganti memiliki kepadatan penduduk terendah sebesar 595 jiwa/km².

1.2 Perumusan Masalah

Memperhatikan uraian umum diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah Letak Strategis Kecamatan Gemolong yang berada di perempatan antar kabupaten mempunyai peran penting dan strategis dalam peningkatan perekonomian?

commit to user

- b. Apakah kawasan Industri dan industri kecil, pertokoan, rumah makan, maupun rumah sakit masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gemolong secara signifikan ?
- c. Apakah terjadi perubahan sektor basis ke non basis di Kecamatan Gemolong ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi letak strategis Kecamatan Gemolong yang berada di perempatan antara Kabupaten Grobogan dan Kotamadya Surakarta, serta antara Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali/ Salatiga mempunyai peran penting dalam peningkatan perekonomian.
- b. Mengidentifikasi kawasan industri maupun industri kecil, pertokoan, rumah makan, rumah sakit yang berada di sekitar Kecamatan Gemolong masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.
- c. Mengidentifikasi perubahan sektor basis yang akan diprioritaskan sebagai sektor unggulan yang menjadi potensi penggerak pembangunan di Kecamatan Gemolong.

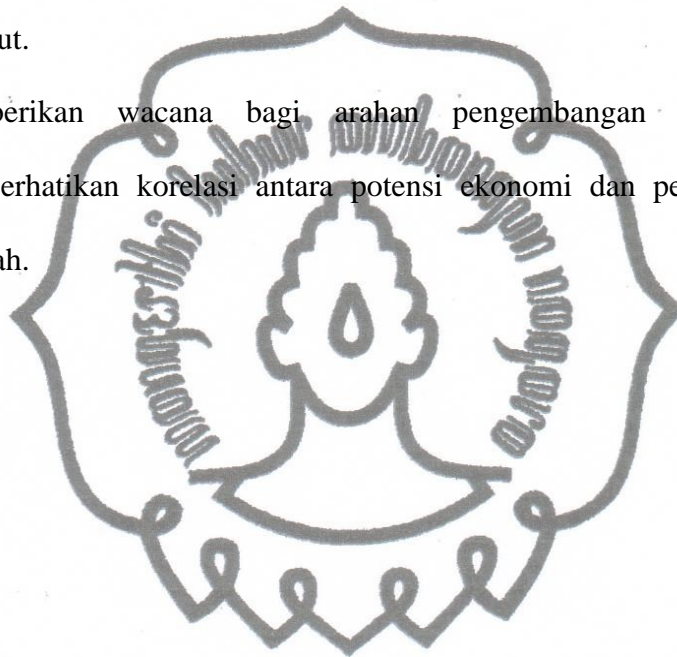
1.3.2. Manfaat

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi Kecamatan Gemolong, antara lain :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai gambaran perkembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kecamatan Gemolong selaku Pusat

Hirarki Kota di Bagian Wilayah Kota II (BWK II), karena pada daerah BWK II ini mempunyai potensi pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan dan kehutanan.

- b. Memberikan kontribusi pada studi pengembangan wilayah Gemolong terutama memberikan solusi terhadap kendala pengembangan wilayah tersebut.
- c. Memberikan wacana bagi arahan pengembangan wilayah dengan memperhatikan korelasi antara potensi ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah.



BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah (Arsyad, 1999: 298). Selanjutnya dikatakan pula, bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal untuk membangun daerah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu yang berorientasi pada proses tersebut meliputi pembangunan institusi baru, pembangunan industri alternatif, pengembangan kapasitas tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan produk yang lebih bagus, identifikasi pasar, alih teknologi dan mendirikan perusahaan maupun kooperat lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada pembangunan endogen yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, daerah untuk

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Jinghan, M.L. (2004), proses pembangunan ekonomi ada empat (4) faktor yang menjadi modal pembangunan ;

1. sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan motivasi);
2. sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar dan iklim);
3. pembentuk modal (mesin-mesin dan jalan raya);
4. tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen dan kewiraswastaan).

Dari keempat hal tersebut masing-masing mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan arah terhadap daerah tentang kebijaksanaan yang mengarah pada pertumbuhan daerah yang diinginkan.

2.1.2. Teori basis ekonomi

Menurut Arsyad (1999 : 116), mengemukakan bahwa teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja (*job creation*) dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang.

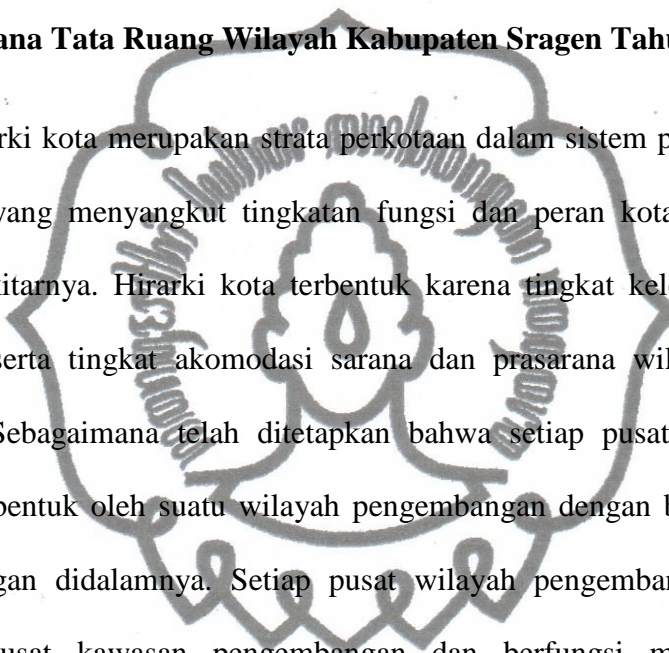
Selanjutnya dikemukakan bahwa teori basis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yang sangat tergantung dari permintaan luar daerah akan produk-produk daerah tersebut. Lebih jelas dikatakan bahwa pertumbuhan atau penurunan perekonomian suatu daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam mengekspor keluar daerah tersebut. Ekspor tersebut baik dalam bentuk barang maupun jasa termasuk tenaga kerja. Industri yang melakukan kegiatan

commit to user

ekspor disebut *sektor basis*. Apabila permintaan akan barang dan jasa meningkat (ekspor), dari daerah maka sektor basis akan berkembang dan pada gilirannya nanti perkembangan ini akan mendorong tumbuhnya sektor-sektor non basis. Dengan demikian akan terjadi peningkatan pendapatan, investasi, konsumsi dan kemampuan kerja di dalam daerah.

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2009 - 2029.



Hirarki kota merupakan strata perkotaan dalam sistem perwilayahan yang lebih luas yang menyangkut tingkatan fungsi dan peran kota dalam melayani wilayah sekitarnya. Hirarki kota terbentuk karena tingkat kelengkapan, tingkat pelayanan serta tingkat akomodasi sarana dan prasarana wilayah dalam kota tersebut. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa setiap pusat pelayanan suatu kawasan dibentuk oleh suatu wilayah pengembangan dengan beberapa kawasan pengembangan didalamnya. Setiap pusat wilayah pengembangan membawahi beberapa pusat kawasan pengembangan dan berfungsi melayani kawasan disekitarnya (hinterland) yang hirarki pelayanannya lebih kecil sesuai dengan konsep pengembangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka arahan pengembangan hirarki kota-kota dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut:

- a) Memilih kota dan meningkatkan peran dan fungsi kotanya, yang berpotensi berkembang secara cepat, yang didukung oleh sarana dan prasarana regional yang berupa sistem jaringan jalan dengan kandungan bahan alam yang potensial untuk mensejajarkan dan meningkatkan kelas jalan yang masih rendah.

b). Memfungsikan pola hirarki kota sebagai salah satu alternatif pola pengembangan wilayah yang tepat, dengan pedoman efektif dan efisien.

Secara rinci rencana hirarki pusat pelayanan di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Kota Hirarki I : Kota Sragen

Kota Hirarki II : Masaran, Gondang, Karangmalang, Sidoharjo, Gemolong, dan Sumberlawang

Kota HirarkiIII: Kalijambe, Plupuh, Kedawung, Sambirejo, Sambungmacan, Ngrampal, Tanon, Miri, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar.

Tabel 2.1. : Hirarki Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Sragen

Kota	Hirarki	Jangkauan	Fungsi Kegiatan
Sragen	I	Regional Kabupaten	Pemerintah, perdagangan, sosial, transportasi, permukiman
Gemolong	I	Sub-regional	Pemerintahan, perdagangan, transportasi, industri, sosial, Permukiman
Tangen	I	Sub-regional	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Gondang	I	Sub-regional	Pemerintahan, perdagangan, sosial, permukiman
Sumberlawang	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, industri, permukiman
Kalijambe	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, industri permukiman
Tanon	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Sambirejo	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Sidoharjo	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, industri, transportasi, permukiman
Ngrampal	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, transportasi, permukiman
Sambungmacan	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, transportasi, permukiman
Karangmalang	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Mondokan	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Sukodono	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Gesi	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Jenar	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Miri	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman
Masaran	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, transportasi, permukiman
Kedawung	I	Lokal	Pemerintahan, sosial, perdagangan, permukiman

Sumber : RTRW Kabupaten Sragen 2009 - 2029

2.2.2. Rencana Pembagian Pusat-Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Sragen

Rencana Pembagian Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dilakukan berdasarkan skenario terpilih yang telah diungkapkan dalam konsep pengembangan tata ruang wilayah dan juga berdasarkan karakteristik wilayah secara keseluruhan. Wilayah pengembangan dan kawasan pengembangan dalam struktur tata ruang Kabupaten Sragen ditentukan berdasarkan efisiensi jangkauan pelayanan dan kawasan-kawasan strategis. Pengembangan tersebut secara efektif tidak termasuk pada kawasan-kawasan yang dilindungi (kawasan lindung).

Titik simpul pengembangan (kota-kota), baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Kawasan pengembangan dan wilayah pengembangan mempunyai hubungan timbal balik dengan pola memusat berupa orientasi pada kawasan-kawasan terdekat yang mempunyai tingkat pelayanan (hirarki) lebih tinggi. Dengan demikian maka kawasan-kawasan permukiman akan berorientasi ke pusat pelayanan dan pengembangan, dan pusat kawasan pengembangan akan berorientasi pada pusat wilayah pengembangan sehingga membentuk suatu struktur tata ruang yang dinamis dan selaras.

Penentuan skala pelayanan (hirarki kota-kota) berdasarkan pada penilaian yang sudah ada, dengan memperhatikan :

- Penyediaan fasilitas pelayanan besaran kota.
- Tingkat aksesibilitas.
- Kecenderungan orientasi perkembangan (ruang dan kegiatan).
- Jumlah penduduk.

Berdasarkan kondisi tersebut pembagian PKL di Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

commit to user

- PKL I yang berpusat di Kecamatan Sragen yang terdiri dari Kecamatan Sragen, Karangmalang, Kedawung, Sidoharjo dan Masaran.
- **PKL II yang berpusat di Kecamatan Gemolong yang terdiri dari Kecamatan Gemolong, Miri, Sumber Lawang, Tanon dan Plupuh**
- PKL III yang berpusat di Kecamatan Tangen yang terdiri dari Kecamatan Tangen, Mondokan, Sukodono, Gesi dan Jenar.
- PKL IV yang berpusat di Kecamatan Gondang yang terdiri dari Kecamatan Gondang, Sambungmacan, Ngrampal dan Sambirejo.

2.2.3. Rencana Fungsi Pusat Kegiatan Dan Kawasan Pengembangan

Pusat pelayanan adalah kota yang mengemban peran sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya (*hinterland*), berdasarkan pola tata jenjang pusat pelayanan yang telah ditentukan. Kota Sragen memiliki tata jenjang pelayanan utama yang mempunyai fungsi pusat pelayanan daerah, sekaligus sebagai kota administratif, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Untuk lebih jelas fungsi pusat kegiatan dan wilayah pengembangan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel 2.2 seperti terlampir

Tabel 2.2 : Hirarki Kota dan Fungsi Pusat Kegiatan dalam Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Sragen

Kecamatan	Karakteristik Fungsional	Pengembangan Sektor	Pusat Pengembangan
<ul style="list-style-type: none"> • Sragen • Karangmalang • Kedawung • Sidoharjo • Masaran • Ngrampal 	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya pertanian irigasi teknis • Pusat pemerintahan • Industri pabrikaan • Industri rumahan (kerajinan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Perdagangan dan jasa • Perhubungan 	Kota Sragen
<ul style="list-style-type: none"> • Kalijambe • Gemolong • Miri • Sumberlawang • Tanon • Plupuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Resapan air waduk Kedungombo (sistem Jratunseluna) dan Kreto • Budidaya pertanian campuran, perikanan, dan hutan lindung setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perikanan • Industri • Perdagangan • Pariwisata • Perhubungan 	Kota Gemolong

Kecamatan	Karakteristik Fungsional	Pengembangan Sektor	Pusat Pengembangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan situs arkeologis • Industri rumahan • Industri pabrikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehutanan 	
<ul style="list-style-type: none"> • Mondokan • Sukodono • Gesi • Tangen • Jenar 	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya pertanian campuran dan hutan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Kehutanan 	Kota Tangen
<ul style="list-style-type: none"> • Sb.macan • Gondang • Ngrampal • Sambirejo 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyangga lindung bawahan • Resapan air primer • Budidaya pertanian campuran, perkebunan, dan kehutanan • Industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Kehutanan • Perkebunan • Pariwisata • Industri 	Kota Gondang

Sumber: RRTRW Kab. Sragen 2009 – 2029

2.2.4 Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Gemolong Tahun 2004 - 2014.

Berdasarkan Buku Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Gemolong terbagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan utama yaitu :

- Pusat pemerintahan dan pusat pelayanan umum yaitu berada di Desa Gemolong dan Desa Kragilan. Desa Gemolong sebagai pusat pelayanan utama di IKK Gemolong dan berfungsi juga sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat perekonomian .
- Pusat perdagangan dan jasa berada di sekitar pusat kota berada di Desa Ngembat Padas dan Desa Kwangen.
- Kawasan-kawasan permukiman di IKK Gemolong tersebar di seluruh wilayah kota.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pembagian wilayah IKK Gemolong terbagi menjada 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK), diantaranya :

commit to user

- a) BWK I merupakan BWK pusat kota. Arahannya pengembangan BWK ini adalah sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Tingkat Kecamatan maupun tingkat Sub Wilayah Perencanaan II Kabupaten Sragen serta sebagai pusat pengembangan permukiman perkotaan. Wilayah BWK ini menampung fasilitas perdagangan secara regional maupun permukiman dan wilayah perkotaan.
- b) BWK II merupakan BWK dengan arahan pengembangan sebagai pusat pengembangan permukiman perkotaan. BWK ini merupakan wilayah yang berada di sebelah utara BWK I. BWK ini dikhususkan untuk pelayanan permukiman perkotaan dengan fasilitas pelayanan umum yang masih menyatu dengan fasilitas pelayanan pusat kota.
- c) BWK III Arahannya pengembangan BWK ini adalah sebagai area penyangga perkotaan meliputi pelayanan kesehatan, permukiman skala sedang dan perdagangan skala lingkungan.
- d) BWK IV Arahannya pengembangan BWK ini adalah sebagai kawasan pengembangan pemukiman, pusat perkantoran dan pemerintahan, pendidikan, pengembangan industri rumah tangga dan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.

2.2.5. Identifikasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Di Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara atau suatu daerah akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomiannya. Dalam proses perubahan struktur ekonomi akan diikuti pula oleh relokasi faktor-faktor produksi dari sektor pertanian ke sektor non pertanian atau dari sektor tradisional ke sektor modern sehingga peranan sektor industri makin meningkat. Dari

commit to user

beberapa penelitian menunjukkan bahwa sektor primer menunjukkan peran yang menurun terhadap Produk Domestik Bruto dengan meningkatnya pendapatan perkapita sedangkan peran sektor lainnya semakin meningkat. Demikian pula yang terjadi di Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi yang terjadi disertai dengan perubahan struktur ekonominya, peranan sektor primer terhadap PDRB semakin menurun sedangkan peranan sektor non primer semakin meningkat.

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat berkaitan dengan kualitas perencanaan daerah dalam upaya memanfaatkan serta mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi daerah perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Lincoln Arsyad, 1993). Hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah harus di buat berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Perubahan struktur ekonomi yang terjadi pada suatu daerah memiliki keterkaitan dengan terjadinya perkembangan sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Dari perubahan struktur ekonomi yang terjadi, khususnya struktur produksi, maka dapat diketahui arah pergeseran atau transformasi struktur ekonomi tersebut. Berdasarkan hasil studi empiris dari para ahli yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, pada umumnya suatu negara/ daerah akan mengalami transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditandai dengan semakin meningkatnya sektor non primer khususnya sektor industri terhadap GNP dan menurunnya peranan sektor primer, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapainya.

2.2.6. Marsum Maulud, 2004. Identifikasi sektor potensial (unggulan) perekonomian di Kabupaten Merauke,

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan ekonomi yang potensial di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 1993 Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua periode tahun 1994–2001.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis *Shift Share*, analisis *Location Quotient (LQ)*, analisis model rasio pertumbuhan (MRP) dan analisis *Overlay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor yang potensial (unggulan) dan memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Merauke adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.

Berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)*, sektor unggulan adalah sektor pertanian di mana LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Berdasarkan analisis model rasio pertumbuhan (MRP) bahwa perekonomian Kabupaten Merauke dalam konteks Provinsi Papua, sektor yang dominan pertumbuhan dan kontribusi yang besar terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Berdasarkan analisis *Overlay* untuk mengetahui deskripsi bahwa sektor yang berpotensi untuk memberikan pertumbuhan dan kontribusi yang besar adalah sektor pertanian dan sektor yang pertumbuhan besar dan kontribusi kecil terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik dan air minum, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa.

Kegiatan ini dapat ditingkatkan kontribusinya untuk dipacu menjadi kegiatan yang dominan.

2.2.7. Ari Purwaningsih, 2003. Kesesuaian hasil evaluasi dengan Konsep Kecamatan Pusat Pertumbuhan dengan menggunakan beberapa alat analisis dapat dikaitkan dengan keberhasilan strategi konsep Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi yaitu:

- a. **Strategi pertama**, dalam penetapan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan tidak dijelaskan kecamatan yang menjadi pilot proyek melayani desa atau kecamatan mana yang menjadi *hinterland*-nya. Apabila hal ini didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Kota Piyungan yang melayani kota Patuk sedangkan kota Pundong dilayani oleh Kota Bantul. Hal ini juga dapat dibuktikan dari penetapan orientasi pengembangan di Kecamatan Piyungan yaitu distribusi dan hasil analisis gravitasi menunjukkan bahwa, Kecamatan Piyungan mempunyai interaksi yang kuat terhadap Kecamatan Berbah, Prambanan (Kabupaten Sleman) dan Kecamatan Patuk (Kabupaten Gunungkidul);
- b. **Strategi kedua**, telah dilakukan baik di Kecamatan Pundong maupun Piyungan, Kecamatan Pundong dengan produk unggulan yaitu sentra industri keramik atau gerabah yang mampu menembus pasar lokal, nasional maupun internasional. Kecamatan Piyungan dengan sentra industri genteng, batu bata dan meubel serta kulit, breksi batu apung (hasil tambang), sedangkan untuk industri menengah dan besar (kawasan industri) yaitu relokasi 12 industri kulit di Yogyakarta dan baru 2 industri;

commit to user

- c. **Strategi ketiga**, dapat dipenuhi melalui hasil analisis skalogram fasilitas ekonomi di kedua wilayah penelitian, dalam menyediakan jasa pelayanan prasarana (*input*) produksi pertanian, seperti lembaga keuangan perbankan dan non perbankan (termasuk koperasi), depot/toko saprotan (sarana produksi pertanian), PPL Pertanian;
- d. **Strategi keempat**, melalui penetapan 7 produk andalan dan 1 produk unggulan baik di Kecamatan Pundong maupun Piyungan, merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi karena adanya *comparative advantage*. Hasil evaluasi dengan analisis *Location Quotient* (LQ), menunjukkan bahwa 7 produk andalan dan 1 produk unggulan yang telah ditetapkan mengalami pergeseran atau perubahan terutama untuk produk andalan. Produk unggulan di Kecamatan Pundong perlu dilakukan pengembangan yang lebih optimal;
- e. **Strategi kelima**, melalui pengembangan pariwisata di kedua wilayah penelitian, yang dikemas melalui paket-paket wisata dan sebagai pusat informasi dan daerah pemasaran hasil industri kecil yang sangat strategis bagi kedua wilayah penelitian.

2.2.8. Prasetya, Donny Tri, 2009. Kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus.

Kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus tersebut terjadi dalam berbagai tingkatan dan aspek. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui perbedaan perkembangan wilayah antara pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus tahun 1997 dan 2007, (2) Mengetahui prioritas pembangunan wilayah di Kabupaten Kudus. Metode

penelitian yang digunakan adalah metode analisa data sekunder yaitu mengolah data yang telah ada yaitu data tahun 1997 dan 2007. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah diajukan. Untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah maka digunakan analisis tabel skoring. Sebelum dilakukan skoring langkah penting yang harus dilakukan adalah memberikan asumsi terhadap indikator-indikator berupa indikator sosial ekonomi demografi, aksesibilitas wilayah dan pelayanan sosial ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Perbedaan nilai variabel yang menyebabkan tingkat perkembangan wilayah antara wilayah yang masuk kategori maju dengan tertinggal cukup mencolok. Kecamatan yang mengalami perkembangan cepat hanya Kecamatan Kota, perkembangan sedang Kecamatan Kaliwungu, Jati, Jekulo, Gebog, Dawe, Mejobo dan Bae. Sedangkan kecamatan masih masuk dalam kategori tertinggal adalah Kecamatan Undaan,. Makna dari temuan ini bahwa kesenjangan perkembangan wilayah antara pusat Kota Kabupaten dengan wilayah pendukungnya masih tinggi. (2) Wilayah-wilayah yang menjadi prioritas I untuk dikembangkan dalam konteks mereduksi fenomena kesenjangan wilayah meliputi Kecamatan Kecamatan Undaan.

2.2.9. Aryan Saruhian, 2006, Ilmu ekonomi regional tidak membahas kegiatan individual melainkan menganalisis suatu wilayah (atau bagian wilayah) secara keseluruhan atau melihat berbagai wilayah dengan potensinya yang beragam dan bagaimana mengatur suatu kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi seluruh wilayah. Artinya unit analisis ekonomi regional adalah wilayah ataupun sektor. Jadi secara ringkas, persoalan utama yang dibahas dalam ekonomi regional adalah menjawab pertanyaan *dimana lokasi* dari berbagai kegiatan

tersebut dilakukan. Pusat pertumbuhan (growth centre) dapat diartikan dengan dua cara, yakni secara fungsional dan geografis.

2.2.10. Fitri Ami Handayani, 2006. Mengurangi kesenjangan wilayah Gerbangkertasusila

Meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Perda Propinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Propinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar Daerah. Namun, pada kenyataannya, hingga kini kesenjangan antar Kabupaten dan Kota di wilayah Gerbangkertosusila tersebut masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan wilayah di Gerbangkertosusila yang ditinjau menurut tiga dimensi pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tahap analisis yang pertama adalah menghitung besarnya kesenjangan yang terjadi dengan menggunakan Indeks Williamson. Kemudian, dilanjutkan dengan analisis pola kesenjangan wilayah dengan Metode Mutidimensional Scaling (MDS). Dari hasil kedua analisis tersebut, dapat diketahui potensi maupun permasalahan pembangunan wilayah di Gerbangkertosusila yang dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi arahan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan, sehingga pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk kesenjangan lingkungan memiliki pola yang berlawanan. Pembangunan yang dilakukan di Gerbangkertosusila selama ini ternyata berdampak pada peningkatan kesenjangan antar Kabupaten dan Kota di

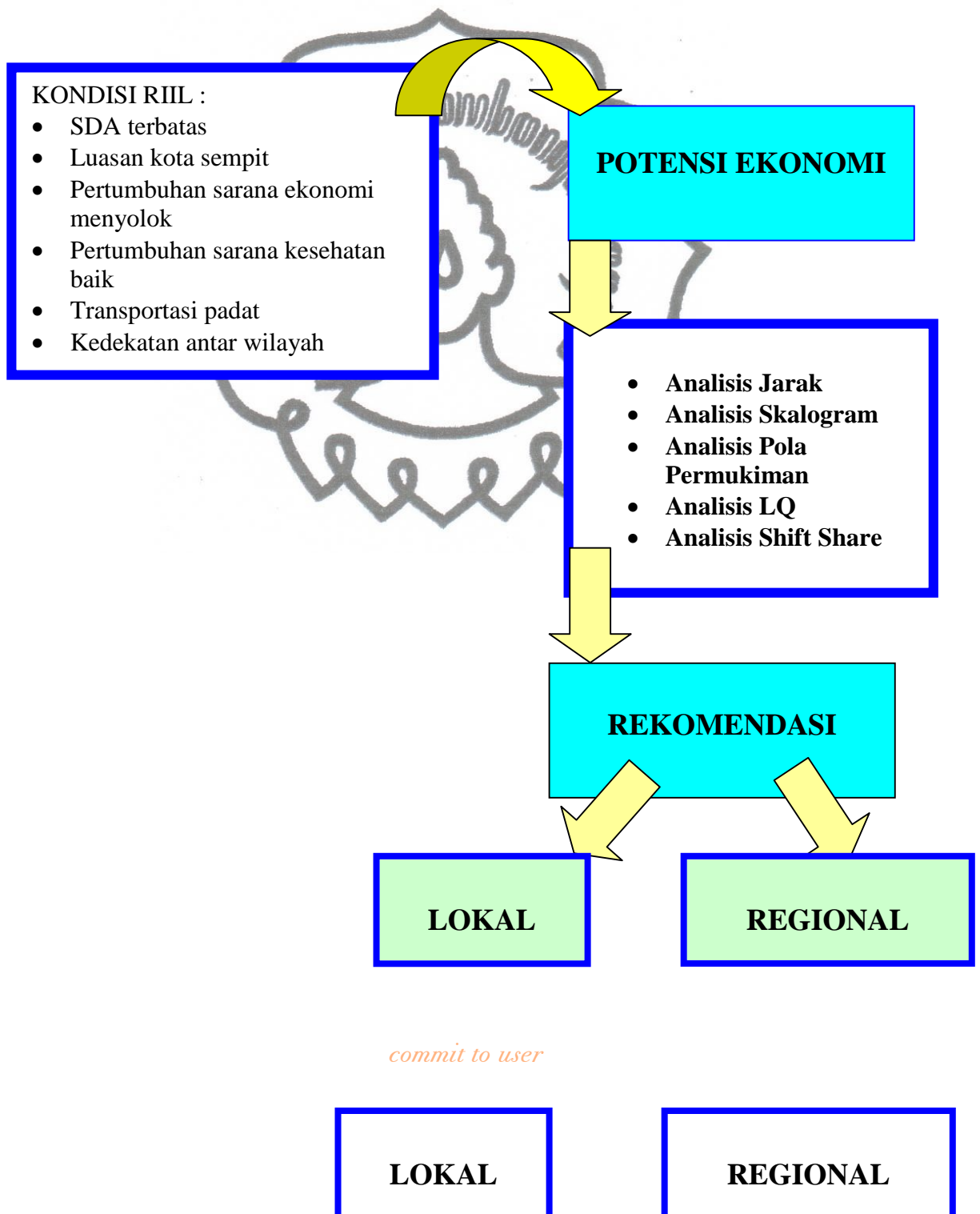
wilayah tersebut. Kesenjangan terutama terjadi antara Kota Surabaya dengan SMA-nya yang meliputi Kabupaten Gresik dan Sidoarjo dengan wilayah-wilayah belakangnya, yaitu Kabupaten Mojokerto, Lamongan dan Bangkalan. Selain itu, pembangunan di Gerbangkertosusila juga berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan degradasi lingkungan. Menanggapi kecenderungan perkembangan di atas, maka arahan pengembangan wilayah Gerbangkertosusila selanjutnya disarankan untuk menggunakan konsep Integrasi Fungsional, yaitu dengan membagi wilayah-wilayah ke dalam kelompok fungsi tertentu yang bersifat komplementer (saling melengkapi). Pembagian fungsi wilayah tersebut disesuaikan dengan potensi dan permasalahan di masing-masing kabupaten/Kota dan terdiri dari fungsi perdagangan jasa, fungsi produksi primer (pertanian, peternakan, perikanan dan tambak), serta fungsi produksi sekunder (industri pengolahan).

2.2.11. Herliawan (1996), di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan menggambarkan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan selama periode tahun 1983-1992. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* dan *Shift Share*.

2.2.12. Wiryadi (2001), di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tujuannya adalah identifikasi sektor unggulan untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian tersebut dilakukan selama periode tahun 1993–1999. Alat analisis yang digunakan *Location Quotient (LQ)*, analisis Model Rasio Pertumbuhan dan Analisis *Overlay*.

2.2.13. Handoyo (2002), di Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah identifikasi sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pekalongan selama periode tahun 1990-1999. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient*, *Dynamic Locaton Quotient (DLQ)*, *Shift Share* Klasik (S-S-K), *Shift Share Esteban–Marquillas* dan *Shift Share Arcellus*.

2.3. Kerangka Pemikiran



2.4. Landasan Teori

2.4.1 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen yang tercermin dari perubahan PDRB memperlihatkan gerak yang cukup dinamis di tahun 2008 yaitu diatas 5% dan selama kurun waktu 8 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi selalu dapat dipertahankan pada angka positif, dengan angka pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa, yakni mencapai 7,94%, hal ini didorong oleh kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan belanja pegawai yang akhirnya berdampak pada kenaikan subsektor pemerintahan dan pertanahan, sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor pertanian yaitu sebesar 3,46%, kondisi ini merupakan dampak dari adanya banjir bandang yang melanda Kabupaten Sragen menjelang akhir Tahun 2007 dan awal tahun 2008. Selain itu krisis ekonomi global juga sedikit banyak mempengaruhi perekonomian regional kabupaten Sragen.

Secara riil berdasarkan harga konstan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen untuk Tahun 2008 mencapai sebesar 5,69%, sedikit mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2007 sebesar 5,73%, melambatnya pertumbuhan di tahun 2008 lebih dikarenakan adanya dampak banjir yang menyebabkan sektor pertanian mengalami penurunan produksi khususnya komoditi tanaman padi dan palawija.

Menurut harga berlaku tahun 2008 besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Sragen secara agregat adalah sebesar Rp. 5.170.914.120.000,- yang menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai sebesar Rp. 4.512.415.740.000,- sehingga terjadi kenaikan 14,59%

commit to user

yang berarti lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11,62%. Kenaikan tersebut lebih didorong oleh naiknya harga barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2008, sehingga pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan, kenaikan harga-harga barang dan jasa dapat terlihat dari besaran angka inflasi PDRB pada Tahun 2008 yang mencapai target sebesar 8,2%.

Pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada sektor jasa sebesar 16,67%, selanjutnya pada urutan kedua pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor bangunan/ konstruksi yakni sebesar 16,36% sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertanian sebesar 13,02%.

Seperti telah disebutkan diatas bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warganya, namun demikian pada kenyataannya jarang dapat berjalan bersama, banyak faktor yang mempengaruhi misalnya kepemilikan modal yang terpusat pada perseorangan/ kelompok/ wilayah tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan nilai tambah bruto yang besar semua itu semuanya belum tentu dinikmati oleh penduduk di wilayah Kabupaten Sragen.

Produk domestik regional bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu daerah di mana pemanfaatan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, besarnya produk domestik regional bruto yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor produksi yang dimiliki. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang baik dan bijaksana akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah di mana hasil produk

commit to user

barang dan jasa mempunyai hubungan langsung dengan permintaan pasar dari luar daerah, dengan menggunakan sumber daya lokal yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan strategis pembangunan dengan memberikan penekanan terhadap bantuan pada dunia usaha yang mempunyai pasar baik lokal maupun nasional dan internasional.

Telah dikemukakan bahwa teori basis ekonomi dapat digunakan untuk meneliti sektor unggulan di Kabupaten Merauke dan dapat dijadikan landasan dan memberikan arah untuk menetapkan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat terwujud. Selanjutnya dengan teridentifikasi sektor unggulan dapat dikembangkan dengan baik sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian dapat pula mempercepat pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang.

2.4.2. Perubahan struktur ekonomi

Perubahan struktur ekonomi suatu daerah dapat digunakan untuk menilai tingkat kemajuan daerah tersebut. Hal ini telah dikatakan dalam teori perubahan struktur ekonomi bahwa apabila terjadi pergeseran struktur ekonomi, ini berarti ada kemajuan atau terjadi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula untuk melihat terjadi perubahan ekonomi dapat digunakan teori laju pertumbuhan dan teori model rasio pertumbuhan. Apabila terjadinya pergeseran yang berawal dari perubahan sektor primer (pertanian) menuju sektor sekunder (industri) bahkan kearah sektor tersier (jasa).

Untuk mengetahui terjadinya perubahan perekonomian di daerah dapat dilihat pada masing-masing sektor maupun subsektor dari waktu ke waktu dalam

commit to user

produk domestik regional bruto. Dengan demikian apabila telah dianalisis dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk dijadikan pengambilan kebijakan pada pembangunan daerah.

2.4.3 Menentukan sektor potensi ekonomi

Untuk menentukan sektor unggulan pada penelitian ini sesuai dengan tujuan digunakan berbagai alat analisis yang digunakan antara lain, *Shift Share*, *Location Quotient(LQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Overlay* .

Dengan menggunakan alat analisis tersebut, akan diketahui gambaran lengkap baik sektor maupun subsektor yang mengalami pertumbuhan dan kontribusi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif secara umum merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang diperlukan untuk menginterpretasikan data-data yang tidak dapat dijelaskan dengan berbagai bentuk uji statistik maupun pembuktian kuantitatif lainnya. Sementara itu, metode kuantitatif diperlukan dalam penelitian ini untuk mengungkap kecenderungan dan membuktikan secara matematis sederhana berbagai data yang bersifat kuantitatif.

3.2. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen yang secara administratif berjumlah 20 kecamatan yang terbagi menjadi 2 kriteria yaitu utara bengawan sejumlah 12 (duabelas) kecamatan yang tidak mempunyai sumber daya alam atau adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya alam yang identik dengan kecamatan miskin dan 8 kecamatan terletak di selatan bengawan yang identik dengan daerah subur dengan sumber daya alam yang lebih mendukung serta infrastruktur yang lebih memadai, sementara Kecamatan Gemolong yang dilakukan analisis merupakan kecamatan yang terletak di utara bengawan, indentik atau mewakili daerah yang tandus.

3.3 Teknik Penarikan Sample

Teknik penarikan data dilakukan dengan metode pengumpulan data –data statistik dimana populasinya adalah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sragen.

3.4 Sumber dan Jenis Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data Monografi Kecamatan Gemolong Tahun 2008 dan 2009 dengan disertai data lain untuk melengkapinya antara lain : Sragen Dalam Angka, Kecamatan Gemolong Dalam Angka, PDRB Kabupaten Sragen tahun 2008, PDRB Kecamatan Gemolong Tahun 2008, Profil Kecamatan Gemolong, Buku RTRW Kabupaten Sragen, Buku RUTRK-IKK Gemolong, Profil Kecamatan Gemolong serta data dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.4.2. Jenis Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis datanya, untuk data primer dilakukan dengan melalui wawancara dan metode survei. Sementara untuk data sekunder, data dikumpulkan dari berbagai sumber data resmi dan produk-produk lain yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, untuk keperluan uji silang terhadap data sekunder perlu dilengkapi dengan wawancara terhadap *stake holders*. Materi wawancara difokuskan pada kebijakan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dikombinasikan dengan hasil analisis data sekunder. Untuk kelompok pertama adalah wawancara dengan pihak Pemerintah (Kabupaten dan Kecamatan) dan kelompok kedua adalah wawancara dengan anggota

masyarakat terutama pada wilayah yang menjadi pusat pengembangan menurut analisis data sekunder;

- b. Data sekunder diperoleh dari beberapa kantor pemerintah yang terkait diantaranya Bappeda, BPS, Kecamatan Gemolong.

3.5. Metode Analisis

Untuk menjawab tujuan pertama maka digunakan analisis-analisis tentang keterkaitan antara tata ruang wilayah dan potensinya dengan pendekatan-pendekatan perencanaan wilayah dan ekonomi, diantaranya :

3.5.1. Analisis Jarak dan Kesempatan Terdekat

Menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, 2005 hal 124 mengatakan bahwa Analisis jarak dan kesempatan terdekat merupakan salah satu teknik analisis yang cukup penting dalam proses perencanaan wilayah . Analisis jarak yang dituangkan dalam bentuk matriks jarak diperlukan untuk mengukur jarak dari wilayah-wilayah permukiman lainnya yang memungkinkan bagi terlaksananya proses interaksi dari anggota masyarakat.

Dalam proses perencanaan daerah yang dititik beratkan di daerah kabupaten/ kota dengan azas desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, wilayah-wilayah permukiman biasanya meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada dalam satu lingkup distrik. Matriks jarak dalam hal ini diukur dari pusat-pusat kecamatan (*urban center*) ke pusat pemerintahan daerah (*local center*) atau dari pusat kecamatan yang satu ke pusat-pusat kecamatan lainnya. Untuk wilayah-wilayah perbatasan, proses interaksi dimungkinkan juga terjadi dengan permukiman-permukiman di luar distrik.

commit to user

Sedangkan Matriks Kesempatan Terdekat diperlukan untuk mengukur jarak dari suatu wilayah permukiman ke pusat-pusat pelayanan tertentu (pendidikan, kesehatan dll) baik untuk pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah permukiman yang sama atau yang berada di permukiman lainnya termasuk yang berada di pusat pemerintahan daerah (ibu kota kabupaten/kota).

Matriks kesempatan terdekat dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat permukiman agar dapat menentukan pilihannya dalam rangka memperoleh fasilitas pelayanan dalam jangkauan jarak daerah terdekat dari permukiman dimana ia tinggal. Namun bagi seorang perencana pembangunan wilayah, matriks ini bermanfaat dalam rangka menentukan keputusan-keputusan hasil perencanaan yang akan direkomendasikan, dengan mempertimbangkan proses interaksi yang terjadi, intensitas aktivitas penduduk yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pendidikan, dan sebagainya serta kemungkinan-kemungkinan lainnya yang terkait dengan masalah pembangunan, dengan demikian diharapkan akan terjadi suatu keseimbangan yang adil dan merata di antara wilayah-wilayah permukiman yang ada, dalam memperoleh/ membangun pusat-pusat pelayanannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan sehingga dapat mendorong distribusi penduduknya, aktivitasnya maupun distribusi pemukimannya.

3.5.2 Analisis Pola Pemukiman

Analisis Pola Pemukiman (*Settlement Function Analysis*) menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, 2005 hal 116 adalah merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai struktur/hierarki dari fungsi-fungsi

pelayanan yang ada dalam suatu wilayah. Melalui analisis ini diharapkan akan diketahui hal-hal mengenai tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Dengan instrument ini tingkat-tingkat pelayanan sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya dapat dilihat, sampai sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayannya, terutama dalam daya jangkau pelayannya. Selain itu, sebagai implikasi dari daya jangkau yang dimiliki oleh pusat-pusat pelayanan, kita juga akan mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang memperoleh pelayanan dan yang belum/tidak memperoleh pelayanan yang memadai.

3.5.3. Analisis Skalogram

Metode ketiga yang dapat digunakan untuk melakukan analisis fungsi adalah *Metode Skalogram*, yang merupakan metode paling sederhana karena hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya.

Menurut Supriyadi dan Brata Kusuma, 2005 hal 121 bahwa alat analisis *skalogram* digunakan untuk mengidentifikasi kota kecamatan yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada ketersediaan fasilitas perkotaan dan peranannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Alat analisis *scalogram* mengelompokkan klasifikasi kota berdasarkan pada tiga komponen fasilitas dasar yang dimilikinya yaitu :

- a. Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi (*Diferensiasi*).

Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan

menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja;

b. Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial (*Solidaritas*).

Fasilitas yang menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial, namun pengelompokan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan;

c. Fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi politik (*Sentralitas*).

Fasilitas ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam sistem kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil sebagai misal institusi kantor pos, sekolah, kantor pemerintahan dan sejenisnya.

3.5.4. Model Analisis Location Quotients (LQ)

Analisis LQ merupakan teknik analisis model basis ekonomi yang akan membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (i) Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini dinamakan *industry basic*; dan (ii) Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar hanya di daerah yang bersangkutan, dimana industri semacam ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal.

Dasar pemikiran teknik analisis LQ ini adalah Teori *Economic Base* yang intinya '*industry basic*' menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah yang

bersangkutan maupun di luar daerah, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap 'industri basic', tetapi juga menaikkan permintaan akan industri 'non basic (local)'. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan *industri basic*. Rumus untuk menghitung basis ekonomi sektoral (Lincoln Arsyad, 1999: 142):

$$LQ = \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t} = \frac{v_i / V_i}{v_t / V_t} \quad (1.2)$$

Dimana:

LQ : *Location Quotient*.

v_i : Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB wilayah studi.

v_t : PDRB total di wilayah studi.

V_i : Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB wilayah referensi

V_t : PDRB total wilayah referensi (Kabupaten Sragen).

Terdapat 3 (tiga) kategori yang dihasilkan dari perhitungan LQ (*Location Quotient*) dalam perekonomian suatu daerah/ kecamatan, yaitu:

- 1) Jika $LQ > 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi

(Kabupaten Sragen). Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor basis.

- 2) Jika $LQ < 1$, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Kabupaten Sragen). Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai sektor non basis.

3.5.5. Analisis Shift Share

Model/analisis SS (*Shift Share*) merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah/ wilayah/kecamatan dibandingkan dengan perekonomian di atasnya. Konsep dasar dari model SS (*Shift-Share*) telah dikembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943) dan dipakai sebagai suatu alat analitik pada permulaan tahun 1960-an oleh Ashby (1964) hingga sekarang (Mulyanto, 2007), Teknik SS digunakan untuk menunjuk dan menemukan sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah/ kawasan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di atasnya. Di samping itu, juga digunakan untuk menggambarkan kinerja (*performance*) sektor-sektor di suatu kawasan/wilayah dibanding dengan kinerja perekonomian di atasnya. Dengan kata lain, SS digunakan untuk menunjuk dan menemukan pergeseran (*shift*) terhadap hasil pembangunan perekonomian suatu daerah bila daerah tersebut memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian di atasnya. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu kawasan/wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian di atasnya serta sektor-

sektornya, dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, menandakan adanya keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam kawasan/wilayah yang bersangkutan. Teknik SS, membagi perubahan pertumbuhan (D_{ij}); menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu: (i) Pengaruh pertumbuhan ekonomi di atasnya (N_{ij}), yang diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan; (ii) Pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri (M_{ij}), yang mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan, dimana melalui pengukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah studi terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan; serta (iii) Pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif (C_{ij}), yang menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan, dimana jika pergeseran diferensial dari suatu sektor dalah positif, maka sector tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Secara matematis, dirumuskan sebagai berikut (Mulyanto, 2007):

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots (1.1)$$

Dimana:

Dij : Perubahan Pertumbuhan Ekonomi (*Shift Share*) pada Wilayah Studi. Bila analisis ini diterapkan pada nilai tambah (VA: *Value Added*) sektor-sektor pembentuk PDRB, maka:

$$Dij = VA_{ij}(t+n) - VA_{ij}(t) \dots\dots\dots (1.1a)$$

Dimana:

VA_{ij}(t+n) : Nilai Tambah sektor i di daerah studi atau di kecamatan j pada tahun t+n.

VA_{ij}(t) : Nilai Tambah sektor i di daerah studi atau di kecamatan j pada tahun t.

Nij : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Wilayah yang Lebih Tinggi atau Wilayah Referensi (Pengaruh Pangsa) atau Pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen, yang dirumuskan:

$$Nij = VA_{ij}(t) \cdot rn \dots\dots\dots (1.1b)$$

Dimana:

$$rn = (VA_n(t+n) - VA_n(t)) / VA_n(t)$$

VA_n(t+n) : PDRB di wilayah referensi atau PDRB Kabupaten Sragen pada tahun t+n.

VA_n(t) : PDRB di wilayah referensi atau PDRB Kabupaten Sragen pada tahun t.

Mij : Pergeseran Proporsional atau Pengaruh Bauran Industri/ Komposisi (*industry mix*).

Besaran ini mengukur rasio antara pertumbuhan suatu sektor pembentuk PDRB di wilayah studi (kecamatan di Kabupaten Sragen) dengan sektor PDRB yang bersangkutan wilayah referensi (Kecamatan Gemolong). Jika hasilnya

positif berarti suatu sektor di wilayah studi tumbuh lebih cepat dibanding dengan sektor yang bersangkutan dalam perekonomian di wilayah referensi (Kabupaten Sragen); demikian pula jika terjadi sebaliknya. Secara matematis dirumuskan:

$$M_{ij} = VA_{ij}(t) \cdot (r_{in} - r_n) \dots\dots\dots (1.1c)$$

Dimana:

$$r_{in} = (VA_{in}(t+n) - VA_{in}(t)) / VA_{in}(t)$$

$$r_n = (VA_n(t+n) - VA_n(t)) / VA_n(t)$$

$VA_{in}(t+n)$: Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen pada tahun $t+n$.

$VA_{in}(t)$: Nilai Tambah sektor i di Wilayah Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah pada tahun t .

C_{ij} : Pergeseran Diferensial atau Pengaruh Keunggulan Kompetitif.

Besaran ini mengukur rasio pertumbuhan PDRB di wilayah studi dengan rasio pertumbuhan sektor tertentu pembentuk PDRB di wilayah referensi (Kabupaten Sragen). Jika hasilnya positif berarti Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen mempunyai daya saing yang lebih kuat, demikian pula jika terjadi sebaliknya. Secara matematis

dirumuskan:

$$C_{ij} = VA_{ij}(t) \cdot (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (1.1d)$$

Dimana:

$$r_{ij} = (VA_{ij}(t+n) - VA_{ij}(t)) / VA_{ij}(t)$$

$$r_{in} = (VA_{in}(t+n) - VA_{in}(t)) / VA_{in}(t)$$

commit to user

$VA_{ij(t+n)}$: Nilai Tambah sektor i di daerah studi atau di kecamatan j pada tahun $t+n$.

$VA_{ij(t)}$: Nilai Tambah sektor i di daerah studi atau kecamatan j pada tahun t .

$VA_{in(t+n)}$: Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Kabupaten Sragen pada tahun $t+n$.

$VA_{in(t)}$: Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Propinsi Jawa Tengah pada tahun t .

Analisis SS (*Shift Share*) ini menggunakan indikator: (i) bila komponen pertumbuhan proporsional (M_{ij}) suatu sektor > 0 , maka sektor bersangkutan mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh positif kepada perekonomian wilayah, begitu pula sebaliknya; dan (ii) bila komponen daya saing (C_{ij}) suatu sektor > 0 , maka keunggulan komparatif dari suatu sektor tersebut meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula sebaliknya.

BAB IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan

4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Sragen secara khusus dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman sesuai dengan heirarki dan fungsinya untuk mengembangkan wilayah secara terintegrasi dengan cara memacu pengembangan terbentuknya kota-kota di pusat perdesaan serta membentuk struktur kegiatan perkotaan. Strategi pengembangan struktur ruang wilayah dapat dilakukan dengan meningkatkan aktivitas wilayah dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung aktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terutama untuk kegiatan pertanian, perdagangan, jasa dan industri yang mendukung kegiatan pertanian.

Strategi pengembangan sistem perdesaan dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Memperlakukan sistem perdesaan sebagai hinterland dalam sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan di Kabupaten Sragen. Sebagai upaya pengintegrasian sistem perdesaan ke dalam sistem perwilayahan Kabupaten Sragen agar tercipta interaksi desa-kota yang harmonis, yang dicerminkan dari berfungsinya pusat-pusat perdesaan dalam suatu kesatuan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sragen.
- (2) Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Upaya

dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan kegiatan-kegiatan ekonomi primer lainnya, sehingga mencapai tingkat produktifitas yang memadai dan berkelanjutan.

- (3) Untuk mengantisipasi pengurangan daya serap tenaga kerja sebagai akibat – salah satunya peningkatan produktifitas sektor-sektor primer tersebut, dan untuk mencegah arus migrasi ke kota-kota besar, perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan non-pertanian perdesaan (*rural non-farm sector*), yaitu kegiatan ekonomi perdesaan yang merupakan keterkaitan langsung dengan potensi sektor-sektor primer perdesaan, seperti misalnya industri makanan dan industri kerajinan, yang berkerakteristik usaha mikro, kecil dan menengah, dan membutuhkan keahlian yang tidak terlalu tinggi (*low skilled*), serta padat karya.
- (4) Melakukan pendekatan komprehensif dalam pengembangan kegiatan non-pertanian perdesaan, sehingga tidak hanya mengembangkan produksinya, tapi juga jaringan pemasarannya.
- (5) Melengkapi kawasan perdesaan dengan prasarana dan sarana, baik yang bersifat umum, sosial dan ekonomi, yang lengkap dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini adalah dalam upaya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk perdesaan dan terfasilitasinya pengembangan potensi-potensi ekonomi perdesaan.
- (6) Mengembangkan sistem pusat perdesaan yang terhirarki dengan baik dan mampu meningkatkan hubungan kawasan perdesaan dengan pusat-pusat

kawasan perkotaan terdekatnya.

Selain strategi sistem pedesaan juga dilakukan strategi pengembangan sistem perkotaan, secara umum adalah peningkatan aktivitas, dimana peningkatan aktivitas dapat dilihat sebagai peningkatan sarana dan prasarana wilayah yang tersedia untuk mendukung aktivitas utama ekonomi yang meliputi perdagangan, jasa dan industri. Sedangkan secara khusus pengembangan sistem perkotaan adalah menciptakan kota yang dinamis, strategi pengembangan sistem perkotaan melalui hirarki kota yang dimaksudkan untuk menentukan sistem jenjang pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada. Strategi pengembangan kota-kota diarahkan untuk memantapkan dan memperjelas hierarki berdasarkan kondisi nyata kawasan-kawasan perkotaan yang ada dan tetap memperhatikan tata jenjang pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tujuan meratakan pusat pelayanan yang efektif dan efisien sampai tingkat lingkungan.

Hierarki kota-kota diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung keterkaitan desa dan kota (*rural-urban linkage*) dan keterkaitan kota dengan pasar nasional bahkan internasional, selain itu pengembangan ini diharapkan meningkatkan peran kota-kota tersebut menjadi *counter-magnet* bagi terjadinya arus urbanisasi yang biasanya menuju ke kota utama maupun ke kota besar.

Kondisi hirarki kota di Kabupaten Sragen sudah mencerminkan kriteria yang ada, sehingga strategi pengembangan perkotaan diarahkan untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarki yang sudah ada.

Peningkatan peran kota-kota tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan dan sesuai dengan peran fungsi kotanya, disamping juga memberikan sarana-prasarana khusus sebagai penarik aktivitas masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan daerah yaitu pemerataan, maka kebijakan pembangunan yang baru memberikan alternatif pusat pertumbuhan wilayah baru yaitu Kecamatan Miri, Sumberlawang, Sambngmacan dan Tangen (berada di hirarki III) disamping kota-kota yang telah lebih dulu berkembang seperti kota Sragen, Gemolong, Gondang yang mempunyai hirarki I dan hirarki II.

Skala aksesibilitas antara kota-kota tersebut hendaknya memiliki pola pelayanan yang berimbang sesuai dengan fungsi dan peran kota, memiliki jaringan yang menjadi penghubung dan juga memiliki alur pengembangan yang terintegrasi. Sistem perkotaan yang ada merupakan bentuk dari struktur wilayah Kabupaten Sragen secara umum dari jaringan-jaringan yang terbentuk dan merupakan sistem aksesibilitas yang terjangkau dan terintegrasi dengan pola pengembangan yang terpadu. Disamping itu, pengembangan kota-kota ibu kota kecamatan yang masih kurang menunjukkan fungsinya sebagai ibu kota kecamatan yang selama ini banyak dialami oleh kecamatan-kecamatan di sebelah utara Bengawan Solo.

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah Kabupaten Sragen diarahkan untuk dapat meningkatkan terjadinya pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan potensi dan kendalanya. Pemerataan pertumbuhan ini dapat dicapai dengan peningkatan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antara wilayah relatif maju dengan wilayah relatif stagnan dan terbelakang.

Perkembangan wilayah kabupaten Sragen yang berkarakteristik menyebar perlu dicari alternatif baru pengembangan ke arah Selatan-Timur dan pengembangan jaringan antara Kabupaten Sragen dengan kabupaten lain disekitarnya. Strategi ini merupakan upaya membuka lebar-lebar pintu kemajuan dan pertumbuhan bagi wilayah yang masih terisolir dan wilayah terbelakang serta wilayah stagnan. Pengembangan lain adalah membuat jalur lingkaran sebagai pembagi lalu lintas agar tercipta pengembangan wilayah yang lebih merata dan mengatasi titik-titik rawan kemacetan.

Pemerintah kabupaten sragen dalam mengatasi hal ini telah melakukan beberapa langkah yang dipandang konkret mampu menjembatani permasalahan-permasalahan perencanaan ruang wilayah dengan tidak lupa memprioritaskan kawasan unggulan , diantaranya:

1. Telah dibuat Pedoman Rencana Pemanfaatan Ruang Wlayah Kabupaten Sragen 2010 -2030 yang didalamnya telah ditentukan dengan kawasan wilayah diantaranya ; a.Kawasan hutan Lindung, b. Kawasan Pertanian, c. Kawasan Hutan Produksi, d. Kawasan Permukina, e. Kawasan Industri, f. Kawasan Pariwisata, g. Kawasan Strategis, dll.

Di Kabupaten Sragen penetapan kawasan strategis lebih ditekankan pada kriteria :

- Memiliki potensi bagi pengembangan ekonomi wilayah;
- Sumber komoditi unggulan kabupaten dan memiliki potensi ekspor;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

- Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi kota;
- Merupakan bagian wilayah kabupaten untuk pengembangan bagian wilayah kabupaten lainnya yang tertinggal, atau bagian kabupaten yang memiliki ketertinggalan secara ekonomi;

Adapun kawasan yang ditetapkan dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di sesuai dengan analisis ruang-wilayah adalah sebagai berikut :

- a) Kecamatan Sragen sebagai pusat kegiatan ekonomi skala kabupaten
- b) Kecamatan Gemolong, Sumberlawang sebagai jaring tangkap ekonomi di wilayah utara Bengawan Solo.
- c) Kecamatan Kalijambe sebagai kawasan Industri
- d) Kecamatan Masaran, Plupuh dan Sidoharjo sebagai kawasan pengembangan wisata agro dan kerajinan mebel
- e) Kecamatan Ngrampal, sebagai kawasan pengembangan kegiatan industri
- f) Kecamatan Sambungmacan sebagai wilayah perbatasan antar provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur

2. Telah dibuat rencana hirarki pusat – pusat pelayanan di Kabupaten Sragen, dengan berbagai cara seperti berikut:

- Memilih kota dan meningkatkan peran dan fungsi kotanya, yang berpotensi berkembang secara cepat, yang didukung oleh sarana dan prasarana regional yang berupa sistem jaringan jalan dengan kandungan bahan alam yang potensial untuk mensejajarkan dan meningkatkan kelas jalan yang masih rendah.

- Memfungsikan pola hirarki kota sebagai salah satu alternatif pola pengembangan wilayah yang tepat, dengan pedoman efektif dan efisien dengan memperhatikan karakteristik fungsi dan pengembangan sektor
3. Pengembangan jalan lingkar utara Kota Sragen menjadi 4 lajur
 4. Pelebaran ruas jalan Gemolong-Tanon-Sragen menjadi 10 meter
 5. Pelebaran ruas jalan Purwodadi-Gemolong-Surakarta menjadi 12 meter
 6. Pengembangan jalur lambat perkotaan Sragen
 7. Relokasi terminal tipe A di Sragen, dll.

4.2. Tata Ruang Kecamatan Gemolong

Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan (RUTRK- IKK) Gemolong yang saat ini berlaku adalah produk RUTRK- IKK yang disusun pada tahun 1989/1990 dimana pada saat itu perencanaan disusun dengan melihat tren yang berkembang dan perkembangan kegiatan Kota Gemolong yang diharapkan perencanaan yang disusun mampu mengimbangi perkembangan kegiatan kota untuk masa dua puluh tahun kedepan dengan berbagai macam pertimbangan dan analisa yaitu sampai tahun 2019. Saat ini RUTRK–IKK Gemolong telah berjalan lebih dari sepuluh tahun. Perkembangannya selama sepuluh tahun tentunya sudah banyak sekali terjadi perkembangan atau pertumbuhan kegiatan kota maupun kegiatan masyarakat yang tentunya akan mempengaruhi pola pergerakan perkembangan maupun pemanfaatan ruang kota Gemolong sebagai hinterland dari Kabupaten Sragen, dan tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh faktor eksternal yaitu adanya perubahan kebijaksanaan regional maupun nasional yang mempengaruhi perkembangan Kota Gemolong maupun faktor internal adanya kebijaksanaan dari

tingkat kabupaten yang mempengaruhi struktur pemanfaatan ruang kota Gemolong sendiri, untuk mengantisipasi kegiatan dan perkembangan mendatang dengan adanya faktor ekstern dan faktor intern yang sangat mempengaruhi pola maupun trend perkembangan kota dengan dukungan kegiatan ekonomi kota yang berkembang sangat cepat. Hal ini didukung pula dengan letak kota Gemolong yang secara geografis sangat strategis, yaitu berada di persimpangan antara kota Surakarta – Grobogan dan Sragen – Boyolali serta dengan dibukanya jalur Kereta Api Banyubiru yang menghubungkan Semarang – Solo, dan mengalami transit di Kecamatan Gemolong.

4.2.1. Kedudukan Kota Gemolong dalam Konstelasi Regional.

Jika ditinjau dari aspek geografis wilayah Gemolong memang mempunyai potensi geografis yang sangat mendukung dengan letaknya yang berada di persimpangan jalur regional baik dari Solo – Purwodadi maupun Sragen/Surabaya – Boyolali/Salatiga. Kedudukan Ibu Kota Kecamatan Gemolong berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten merupakan pusat Sub Wilayah Pelayanan II untuk skala regional. Ibu Kota Kecamatan Gemolong mempunyai potensi yang sangat mendukung dalam pengembangan kota, terlebih lagi dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sragen menjadikan Gemolong sebagai kota kedua setelah Ibukota Kabupaten, dengan adanya kedudukan dan adanya kebijaksanaan tersebut sangat diperlukan suatu arahan pembangunan ataupun perencanaan kota yang sangat komprehensif dengan mempertimbangkan kedudukan dan daya tarik dari kebijaksanaan pembangunan wilayah sekitar, wilayah yang

commit to user

melingkupi Ibu Kota Kecamatan Gemolong dalam hal ini adalah Kecamatan Miri, Kalijambe, Tanon dan Plupuh.

Dijadikannya Kecamatan Kalijambe sebagai kawasan Industri, kecamatan Plupuh sebagai sentra industri batik tradisional yang mempunyai ribuan pembatik tradisional perlu diantisipasi dan dimanfaatkan bagi pengembangan kota Gemolong, hal ini sudah terlihat embrionya dengan dukungan desa Kragilan yang sudah menunjukkan kegiatannya kearah industri terutama industri mebel yang saat ini sudah berkembang tidak hanya melayani skala regional namun sudah meningkat untuk kegiatan ekspor. Dengan adanya pengembangan ini kota Gemolong didorong untuk mampu menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dapat menunjang kegiatan kota dalam menampung aktivitas kota Gemolong sendiri dan menampung aktivitas kota sekitarnya.

4.2.2. Hubungan Kota Gemolong dengan Wilayah Sekitar.

Analisa hubungan kota dengan wilayah sekitar ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar ketergantungan kota Gemolong dengan kota sekitarnya serta keterkaitan aktivitas kota dengan wilayah sekitar, dimana hubungan ini akan menentukan pola atau sistem dan jenis fasilitas yang harus tersedia dan disediakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil analisis ini berupa pola/arah dan kualitas hubungan antar sektor – sektor kegiatan ekonomi yang akan menjadi masukan yang penting dalam penentuan kebijakan arah pengembangan fungsi dan peran kota, yang mana maksud pembagian wilayah IKK Gemolong adalah untuk mengantisipasi perkembangan kota sesuai dengan karakteristik dan kecenderungan perkembangannya. Berdasarkan

commit to user

kondisi tersebut terdapat 4 (empat) bagian wilayah kota (BWK) dengan karakteristik rencana pengembangan kota, yakni ;

1. BWK I merupakan BWK pusat kota yang meliputi wilayah sebagian kelurahan Gemolong, sebagian wilayah kelurahan Kwangen dan sebagian kelurahan Ngembat Padas. Arahannya pengembangan BWK ini adalah sebagai pusat perdagangan skala Kecamatan maupun skala Sub Wilayah Pengembangan (SWP) II Kabupaten Sragen serta pusat pengembangan permukiman perkotaan.

Kegiatan yang terdapat di BWK I meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, permukiman.

2. BWK II merupakan BWK yang berada di sebelah utara BWK I meliputi wilayah sebagian kelurahan Gemolong dengan arahannya pengembangan sebagai pusat pengembangan permukiman perkotaan.

Kegiatan BWK II meliputi kegiatan permukiman, perdagangan, perkantoran, transportasi .

3. BWK III berada di sebelah barat meliputi wilayah sebagian kelurahan Kwangen dan sebagian kelurahan Ngembat Padas. Arahannya pengembangan sebagai kawasan penyangga perkotaan meliputi permukiman skala sedang, perdagangan dan jasa perkantoran, pendidikan, kesehatan dan pertanian.

4. BWK IV merupakan BWK yang berada di sebelah selatan yang mendekati perbatasan dengan kecamatan Kalijambe merupakan BWK penyangga perkotaan. Wilayah BWK IV ini meliputi sebagian kelurahan Gemolong, sebagian kelurahan Kragilan. Arah pengembangan BWK IV adalah sebagai kawasan pengembangan permukiman, pusat perkantoran dan pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, pengembangan industri kecil dan transportasi (terminal).

Kegiatan utama di BWK IV adalah kegiatan permukiman dan perkantoran/ pemerintahan akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan lainnya yakni perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, industri kecil, transportasi (terminal).

4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sragen

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah, untuk Kabupaten Sragen PDRB menurut harga konstan secara agregat terjadi perubahan dari tahun 2008 sebesar Rp. 2.729.450.330.000 naik menjadi Rp. 2.893.427.210.000 di tahun 2009 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 163.976.880.000 atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,01 % laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,69 % dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah yang mencapai sebesar 4,71 %.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yakni mencapai 8,22 %, hal ini didorong oleh kebijaksanaan pemerintah pusat dalam menaikkan belanja pegawai yang berdampak pada kenaikan subsektor pemerintahan dan pertahanan disusul kemudian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yakni sebesar 7,04 %. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 5,06 % yang berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan kenaikan pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 6,88 %, kondisi ini sebagai akibat dari pengaruh krisis global yang berdampak pada sektor industri khususnya industri yang memiliki pasar luar negeri karena mengalami penurunan permintaan, disamping itu juga area pasar bebas kawasan ASEAN dengan negara China yang sudah berlaku sehingga berbagai jenis produk dengan harga yang murah dari luar negeri bebas memasuki pasar regional maupun nasional, sehingga produk nasional yang tidak siap bersaing tentu saja akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sedangkan laju pertumbuhan perekonomian pada tahun 2009 atau besaran PDRB menurut harga berlaku di Kabupaten Sragen secara agregat adalah mencapai sebesar Rp. 5.871.144.810.000,- yang memperlihatkan adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai sebesar Rp. 5.170.914.120.000,- sehingga terjadi kenaikan sebesar 13,54 % atau secara agregat naik sebesar Rp. 700.230.690.000,- Kenaikan tersebut lebih didorong oleh naiknya harga barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2009, sehingga pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan menurut harga konstan.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2008 sebesar 14,59 % maka pertumbuhan tahun 2009 relatif lebih kecil. Pada umumnya laju pertumbuhan ekonomi menurut harga berlaku dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa, hal ini dapat terlihat dari besaran angka inflasi PDRB pada tahun 2008 yang mencapai sebesar 7,11 %.

Pertumbuhan tertinggi menurut harga berlaku terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 17,53 % , selanjutnya pada urutan kedua pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor pertanian yakni sebesar 14,22 % hal ini disebabkan oleh banyaknya warga Kabupaten Sragen yang merantau baik secara individu, keluarga ataupun kelompok manajemen yang bersama-sama untuk berjualan barang-barang lokal terutama kosmetik, peralatan dapur produk kabupaten sragen maupun pakaian jadi lebih spesifik lagi berjualan batik antar pulau dengan tujuan utama adalah daerah-daerah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Irian maupun Timor Leste, setiap barang dagangan habis mereka pulang sambil berbelanja dan menginvestasikan uangnya di Kabupaten Sragen ataupun menjadi tenaga kerja di luar negeri terutama di Arab Saudi, Taiwan, Singapura dan Malaysia yang selalu mengirimkan uangnya ke tanah air serta jika dilihat dari sektor pertanian Kabupaten Sragen yang mayoritas lahannya digunakan untuk pertanian produksi padinya selalu surplus sehingga merupakan lumbung padi bagi Jawa Tengah, maupun nasional, pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 10,35 %. Karena pada umumnya industri yang berkembang di Kabupaten Sragen adalah industri Garmen (lihat lampiran 1 dan 2).

Tabel :4.3.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2000 – 2009

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga konstan	
	Nilai (juta Rp)	% Pertumbuhan	Nilai (juta)	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	1.907.231,61	-	1.907.231,61	-
2001	2.140.956,11	12,25	1.963.635,72	2,96
2002	2.396.061,90	11,92	2.030.754,79	3,42
2003	2.699.973,28	12,68	2.104.533,13	3,63
2004	3.059.653,15	13,32	2.208.294,40	4,93
2005	3.497.324,94	14,30	2.322.239,43	5,16
2006	4.042.561,37	15,59	2.442.570,43	5,18
2007	4.512.415,74	11,62	2.582.492,48	5,73
2008	5.170.914,12	14,59	2.729.450,33	5,69
2009	5.871.144,81	13,54	2.893.427,21	6,01

Angka agregat PDRB terbentuk dari berbagai kegiatan sektor ekonomi, dari perjalanan waktu karena perubahan dan perkembangan ekonomi distribusi / penyebaran PDRB ke dalam berbagai sektor selalu mengalami perubahan.

Dalam periode waktu lima tahun terakhir, sektor pertanian, industri dan perdagangan masih memberikan kontribusi yang dominan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sragen, hal ini terlihat dari indeks distribusi PDRB, khususnya sektor pertanian menyumbangkan sekitar 35,32 %. Pada tahun 2009 dari tabel 4.3.4 diperoleh gambaran bahwa sumbangan terbesar untuk PDRB atas dasar harga berlaku adalah dari sektor pertanian sebesar 35,32 % kemudian sektor industri 17,64% dan sektor perdagangan memberikan andil sebesar 17,65 %. Sedangkan sumbangan terkecil adalah dari sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar

0,29 %. Dari distribusi antar sektor terlihat bahwa sektor pertanian memberikan andil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan andil tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan kontribusi beberapa sektor yang lain terhadap total PDRB mengalami penurunan sesuai tingkat produktivitas masing-masing sektor. Andil terhadap agregat PDRB yang mengalami kenaikan selain sektor pertanian adalah sektor jasa-jasa yang pada tahun 2008 memberikan andil 14,06 % mengalami kenaikan menjadi 14,55 %, dan sektor keuangan naik dari 4,04 % menjadi 4,05 %. Sedangkan tujuh sektor lainnya mengalami penurunan misalnya sektor perdagangan turun dari 17,73 % pada tahun 2008 menjadi 17,65 % pada tahun 2009. Perubahan indeks distribusi selama ini masih relatif wajar seiring dengan perubahan tingkat produktivitas masing-masing sektor.

Tabel : 4.3.4. DISTRIBUSI PDRB KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2009

SEKTOR	DISTRIBUSI PDRB (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	35,32	33,76
2. Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,30
3. Industri Pengolahan	17,64	22,08
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,80	1,21
5. Bangunan/Konstruksi	4,69	4,47
6. Perdagangan	17,65	18,47
7. Pengangkutan dan Komunikasi	4,01	3,29
8. Keu,Persewaan& Js Perusahaan	4,05	4,06
9. Jasa-Jasa	14,55	12,36

Perubahan andil terhadap total PDRB adalah dari sektor Pertanian yang mengalami kenaikan sebesar 0,21 % dari 35,11 % di tahun 2008 menjadi 35,32 % pada tahun 2009, kemudian sektor industri yang turun perannya terhadap PDRB dari yang

semula di tahun 2008 sebesar 18,15 % menjadi 17,64 % di tahun 2009, sehingga ada penurunan sebesar 0,51 %, serta sektor Listrik, Gas dan Air Bersih turun andilnya menjadi 1,80 % di tahun 2009 yang sebelumnya di tahun 2008 memberikan andil sebesar 1,84 %.

Menurut harga konstan, tabel 4.3.4 andil terbesar pada PDRB tahun 2009 adalah dari sektor pertanian sebesar 33,76 % yang berarti menurun jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang memberikan sumbangan sebesar 34,01 % sehingga terjadi penurunan sebesar 0,25 %, penurunan yang terjadi pada sektor pertanian ini adalah sebagai akibat bencana alam banjir yang melanda wilayah DAS Bengawan Solo di Kabupaten Sragen dan juga sebagai pengaruh dari pesatnya perekonomian daerah serta meningkatnya infrastruktur telah berpengaruh terhadap struktur perekonomian daerah dari pertanian ke industri. Sumbangan terbesar kedua adalah sektor industri yang memberikan andil sebesar 22,08 %, yang mengalami penurunan sebesar 0,20 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 22,28 %. Berikutnya adalah sektor perdagangan yang memberikan sumbangan sebesar 18,47 % yang mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,15 % jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang memberikan andil mencapai 18,32 %. Andil terkecil diberikan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang memberikan sumbangan sebesar 0,30 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara menyeluruh pada lampiran 3 dan lampiran 4 tabel : 4.3.5 dan 4.3.6 (lampiran 9 dan lampiran 10).

Dari seluruh sektor kegiatan ekonomi di Kabupaten Sragen terdapat empat sektor yang cukup dominan yaitu, sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan sektor

Jasa-Jasa Jumlah andil dari keempat sektor dominan tersebut terhadap total PDRB Kabupaten adalah 85,16 % ADHB dan 86,67 % ADHK, seperti pada tabel : 4.3.7

Tabel: 4.3.7. DISTRIBUSI PROSENTASE SEKTOR DOMINAN PDRB KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 – 2009

SEKTOR USAHA	HARGA BERLAKU		PERUBAHAN (%)	HARGA KONSTAN		PERUBAHAN (%)
	2008	2009		2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.PERTANIAN	35,11	35,32	0,59	34,01	33,76	-0,73
2.INDUSTRI	18,15	17,64	-2,81	22,28	22,08	-0,89
3.PERDAGANGAN	17,73	17,65	-0,45	18,32	18,47	0,81
4.JASA-JASA	14,06	14,55	3,48	12,12	12,36	1,98
JUMLAH	85,05	85,16	0,13	86,73	86,67	-0,09

Pengelompokan sektor yang lain adalah pengelompokan yang didasarkan atas output maupun input dari asal terjadinya proses produksi untuk masing-masing sektor ekonomi, yaitu sektor primer apabila output masih merupakan proses tingkat dasar, sektor sekunder yakni jika input berasal langsung dari sektor primer dan output sudah melalui proses lebih dari proses tingkat dasar, sedangkan sektor tersier apabila output lebih dominan pada pelayanan/jasa.

1. **Kelompok primer** : Sektor pertanian dan pertambangan/penggalian
2. **Kelompok sekunder** : Sektor industri, listrik / gas dan air bersih, bangunan / konstruksi.
3. **Kelompok tertier** : Sektor perdagangan, pengangkutan/komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, pemerintahan umum/hankam dan jasa-jasa.

Tabel 4.3.8. DISTRIBUSI PROSENTASE KELOMPOK SEKTOR PDRB KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 - 2009

SEKTOR/LAPANGAN USAHA	HARGA BERLAKU		PERU BAHAN (%)	HARGA KONSTAN		PERU BAHAN (%)
	2008	2009		2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. KELOMPOK PRIMER	35,42	35,62	0,56	34,31	34,06	-0,72
2. KELOMPOK SKUNDER	24,71	24,14	-2,34	27,97	27,76	-0,75
3. KELOMPOK TERSIER	39,87	40,24	0,92	37,72	38,18	1,21
J U M L A H	100,00	100,00	Xxxx	100,00	100,00	xxxx

Dari ketiga kelompok sektor pada tabel 4.3.8 pada tahun 2008 terhadap tahun 2009 baik harga berlaku maupun harga konstan terjadi pergeseran andil, meskipun relatif kecil. Kelompok tersier baik menurut harga berlaku maupun harga konstan memperlihatkan perubahan yang positif, hal ini sebagai gambaran jika masyarakat Sragen perlahan dan pasti kebutuhan sifatnya pelayanan / jasa semakin meningkat.

4.4. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Gemolong

Berdasarkan hasil analisis wilayah kota Gemolong saat ini aktivitas yang sangat menonjol adalah kegiatan perdagangan, jasa serta industri khususnya industri rumah tangga. Dengan melihat perkembangan dan rencana wilayah yang melingkupi kota Gemolong seperti adanya pengembangan Kecamatan Kalijambe sebagai pusat industri otomatis kota Gemolong dapat menangkap dan memanfaatkan potensi tersebut terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana baik itu sarana penyedia jasa, perdagangan maupun pergudangan

Produk Domestik Regional Bruto Kecamatan baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan di Kabupaten Sragen pada tahun 2009 memperlihatkan nilai agregat yang bervariasi (Lihat tabel 4.4.1) , PDRB Kecamatan tertinggi dicapai oleh Kecamatan Sragen sebesar Rp. 858.688,77 juta hal ini sangat wajar mengingat bahwa Sragen merupakan Ibu Kota Kecamatan yang sekaligus menjadi Ibu Kota kabupaten sehingga hampir semua sektor mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan terendah adalah Kecamatan Tangen yaitu sebesar Rp. 110.116,64 juta, hal ini disebabkan Kecamatan Tengen beserta Kecamatan Gesi, Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Jenar memang merupakan daerah yang sangat miskin sumber daya alam maupun sumber daya air, secara geografis lahannya merupakan lahan gamping yang berbukit-bukit dan tidak produktif, sedangkan andil besarnya PDRB Kecamatan terhadap total PDRB Kabupaten Sragen didominasi oleh Kecamatan di Selatan aliran Bengawan Solo yakni, tertinggi adalah Kecamatan Sragen sebesar 14,63 %, kemudian Kecamatan Sidoharjo sebesar 11,43 % dan Kecamatan Masaran sebesar sebesar 10,87 % sedangkan Kecamatan lainnya memberikan andil berkisar antara 1,88 % hingga 5,83 %. Apabila menurut harga konstan besarnya PDRB Kecamatan tertinggi yaitu Kecamatan Sragen yaitu sebesar Rp. 409.494,45 juta dan terendah yakni Kecamatan Tangen sebesar Rp. 52.027,21 juta. Andil pembentukan PDRB Kecamatan terhadap Kabupaten urutan tertinggi dicapai Kecamatan Sragen sebesar 14,15 %, Kecamatan Sidoharjo sebesar 12,54 % dan Kecamatan Masaran sebesar 11,53 % sedangkan terendah dicapai oleh Kecamatan Tangen 1,81 %.

Tabel : 4.4.1. PDRB KECAMATAN GEMOLONG TAHUN 2009

NO	LAPANGAN USAHA	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
		2008	2009	2008	2009
	1	2	3	4	5
1	Pertanian :				
	a. Tabama	60.152,92	69.935,11	30.797,32	32.932,62
	b. Perkebunan	3.585,94	3.989,11	1.911,26	1.987,68
	c. Peternakan	6.423,37	7.264,02	3.183,15	3.329,11
	d. Kehutanan	269,97	300,08	132,09	137,92
	e. Perikanan	982,49	1.136,95	480,66	515,07
	Total Pertanian	71.414,69	82.625,27	36.504,48	38.902,40
2	Pertambangan -Penggalian	62,82	70,76	33,32	35,40
3	Industri Pengolahan	37.672,48	41.384,97	24.400,60	25.519,95
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	5.305,82	5.921,01	1.788,77	1.958,95
5	Bangunan - Konstruksi	13.586,99	15.374,92	6.834,09	7.231,01
6	Perdagangan	48.475,60	55.514,90	26.182,00	28.309,95
7	Pengangkutan-Perhubungan	8.683,01	9.682,05	3.714,09	3.910,72
8	Keuangan, Persw dan Js Psh	11.781,12	13.506,94	6.181,03	6.684,04
9	Jasa - Jasa	40.848,12	48.027,60	18.593,11	20.129,31
	Jumlah PDRB (jutaan Rp)	237.830,65	272.108,42	124.231,49	132.681,73
	Penduduk	45.613	46.726	45.613	46.726
	PDRB Per Kapita (Rp)	5.214.097,95	5.823.490,56	2.723.598,35	2.839.569,62

Besarnya PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kecamatan tertinggi diperoleh Kecamatan Sidoharjo yakni sebesar Rp. 13.123.140,86 disusul Kecamatan Sragen yaitu sebesar Rp. 13.055.933,86 dan terendah adalah Kecamatan Tangen yakni sebesar Rp. 4.063.794,89. Besarnya PDRB perkapita tersebut perlu dicermati dengan hati-hati karena belum tentu angka yang besar tersebut merupakan kondisi yang sebenarnya, dikarenakan angka PDRB perkapita tersebut masih

commit to user

termasuk output yang dimiliki oleh penduduk luar (bukan warga Sragen). Secara sekilas perkembangan PDRB per Kecamatan adalah sebagai berikut (seperti terlihat lampiran 5 dan lampiran 6)

Kecamatan Gemolong merupakan wilayah yang strategis yakni di persimpangan antara jalur menuju Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan, menjadikan kota Kecamatan Gemolong sebagai pusat pengembangan ekonomi khususnya wilayah Sragen barat. Kecamatan Gemolong merupakan wilayah yang terletak di utara Bengawan Solo dengan areal persawahan dan ladang tadah hujan yang mengandalkan turunnya hujan untuk bercocok tanam, dampaknya adalah produksi pertanian sangat fluktuatif dan produktivitasnya juga rendah dan sangat dipengaruhi oleh musim.

Untuk tahun 2009 Kecamatan Gemolong pertumbuhan PDRB dapat mencapai di atas pertumbuhan Kabupaten, yaitu sebesar 14,41 % dengan nilai agregat Rp. 272.108,42 juta, sedangkan tingkat PDRB perkapita dicapai adalah Rp. 5.823.490,56 yang berarti terdapat kenaikan sebesar 11,69 % apabila dibandingkan dengan tahun 2008. Secara sektoral pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa sebesar 17,58 %. Sedangkan terkecil adalah pertumbuhan yang terjadi pada sektor industri pengolahan yang mencapai 9,85 %. Kontribusi Kecamatan Gemolong terhadap PDRB Kabupaten ADHB adalah sebesar 4,63 % dan 4,59 % menurut ADHK. Sesuai dengan sebaran indeks distribusi jika pertumbuhan ekonomi dijadikan prioritas pembangunan maka sektor pertanian haruslah dipertahankan jangan sampai mengalami penurunan produksi, karena kontribusi sektor pertanian menempati urutan pertama dalam pembentukan PDRB di

commit to user

Kecamatan Gemolong yakni mencapai 29,32 % disamping sektor-sektor lainnya juga dikembangkan secara proporsional.

Tabel : 4.4.2 , DISTRIBUSI dan PERTUMBUHAN PDRB KECAMATAN GEMOLONG TAHUN 2009

NO	LAPANGAN USAHA	Distribusi ADHB		Distribusi ADHK		Pertumbuhan 2009	
		2008	2009	2008	2009	ADHB	ADHK
	1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian :						
	a. Tabama	25,29	25,69	24,79	24,82	16,26	6,93
	b. Perkebunan	1,51	1,47	1,54	1,50	11,24	4,00
	c. Peternakan	2,70	2,67	2,56	2,51	13,09	4,59
	d. Kehutanan	0,11	0,11	0,11	0,10	11,15	4,41
	e. Perikanan	0,41	0,42	0,39	0,39	15,72	7,16
	Total Pertanian	30,02	30,36	29,39	29,32	15,70	6,57
2	Pertambangan -Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	12,64	6,24
3	Industri Pengolahan	15,84	15,21	19,62	19,22	9,85	4,59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	2,23	2,18	1,44	1,48	11,59	9,51
5	Bangunan - Konstruksi	5,71	5,65	5,50	5,45	13,16	5,81
6	Perdagangan	20,38	20,40	21,08	21,34	14,52	8,13
7	Pengangkutan-Perhubungan	3,65	3,56	2,99	2,95	11,51	5,29
8	Keuangan, Persw dan Js Psh	4,95	4,96	4,98	5,04	14,65	8,14
9	Jasa – Jasa	17,19	17,65	14,97	15,17	17,58	8,26
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	14,41	6,80
	PDRB Perkapita	xvxvx	xvxvx	xvxvx	xvxvx	11,69	4,26

4.2 Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Untuk menentukan potensi ekonomi di Kecamatan Gemolong dilakukan analisis terhadap 9 sektor di Kecamatan Gemolong sebagai daerah penelitian dibandingkan dengan Kabupaten Sragen dengan hanya membandingkan PDRB Tahun 2009 dengan PDRB Tahun 2008 dengan menggunakan alat analisis Analisis Jarak dan Kesempatan, Analisis Pola Permukiman, Analisis Skalogram, Analisis *Shift Share*, maupun dengan metoda *Location Quotient (LQ)*

4.2.1. Analisis Jarak dan Kesempatan

4.2.1.a. Analisis Aksesibilitas

Faktor aksesibilitas akan berpengaruh besar kepada berbagai sektor kegiatan baik ekonomi maupun sosial karena akan menentukan tingkat kemudahan dan kelancaran pergerakan orang dan barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itu, pertimbangan aksesibilitas dalam setiap keputusan lokasi suatu kegiatan akan menjadi mutlak karena akan sangat berdampak kepada operasional dari kegiatan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis/penilaian terhadap jarak terjauh yang dilayani oleh pusat pelayanan yaitu Kabupaten Sragen terhadap masing-masing ibukota kecamatan sebagai fungsi pusat pelayanan masyarakat sejauh 33 kilometer yaitu kecamatan Miri sedangkan yang terdekat Kecamatan Sidoharjo sejauh 3 kilometer hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan optimal tidaknya suatu ibukota dari suatu wilayah administrasi pemerintahan dengan menggunakan jarak antar ibukota kecamatan,(Lihat Tabel : 4.2.1)

Data tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Gemolong berdasarkan aksesibilitasnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat

commit to user

Kota ini sebagai pusat pelayanan bagi daerah *hinterland* kabupaten Sragen, sehingga relatif berkembang lebih cepat daripada subwilayah yang berada di pedalaman atau tidak dilewati jalur lintas utama tersebut dalam hal ini jarak jangkauan pelayanan yang biasa ditempuh dari Kecamatan Gemolong Ke Kabupaten Sragen sejauh 28 km, dari Gemolong ke Solo sejauh 19 km, dari Gemolong ke Boyolali sejauh 30 km, serta dari Gemolong ke Grobogan sejauh 20 km, oleh karena itu Kecamatan Gemolong dipandang mempunyai keuntungan dengan posisi relatif di tengah-tengah persimpangan tersebut. Kedekatan jarak ini terutama sekali sangat mempengaruhi pola urbanisasi dan migrasi serta transportasi pekerja migran karena biaya hidup dan harga tanah maupun properti yang sudah tidak terjangkau oleh mereka maka mereka lebih cenderung untuk minggir dengan tetap memperhatikan sarana transportasi serta kedekatan jarak rumah dengan tempat kerja, sehingga akan banyak sekali tumbuh perumahan di sekitar Kecamatan Gemolong seperti Perumahan Gemolong Indah I, II, Perumahan Kwangen Permai, Perumahan Kalijambe Permai yang pada umumnya diisi oleh para pekerja migran baik dari sektor formal maupun non formal karena dipandang kedekatan jarak dengan Kota sekitar serta transportasinya sangat murah sehingga secara tidak langsung tentunya juga akan mempengaruhi bahkan meningkatkan peredaran barang dan jasa maupun sektor-sektor lainnya dari dan ke kota sekitar atau sebaliknya.

Dampak dari banyaknya permukiman baru tentunya akan membawa bangkitan ekonomi baru bagi wilayah telitian karena akan terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan-kebutuhan primair, sekundair maupun tersier hal ini

terbukti dengan semakin menjamurnya mini market, ruko, rumah makan, tempat-tempat hiburan dan wisata serta lain sebagainya.

Secara teoritis jalan utama yang menghubungkan Gemolong dengan Wilayah sekitar dapat dikategorikan ke dalam jalan Propinsi yang artinya segala pengelolaan jalan menjadi kewenangan Propinsi. Tipe jalan propinsi ini relatif baik untuk pengembangan wilayah pada daerah yang cukup luas, yang kemudian saling dihubungkan oleh jalan kolektor primer dan jalan lokal primer lainnya hanya saja, kualitas jaringan jalan tersebut saat ini sebagian berada dalam kondisi sedang dan rusak ringan dengan akses dan orientasi pergerakan melintasi wilayah Kabupaten Grobogan dengan Kota Solo melewati Kecamatan Gemolong, sedangkan jalan lokal primer kondisinya belum memungkinkan untuk transportasi kendaraan besar dengan intensitas yang padat akibatnya ialah sangat terbatasnya dukungan jaringan jalan alternatif bagi aktivitas penduduk di Kecamatan Gemolong . Oleh karena itu, umumnya pergerakan orang, barang, dan jasa di Kecamatan Gemolong tetap saja memanfaatkan jaringan jalan utama yang sudah ada dengan memperhatikan faktor kedekatan jarak.

Namun jika dicermati lebih jauh, sebenarnya dengan keberadaan jaringan jalan alternatif yang tersebar sekitar kecamatan Gemolong serta rencana pembuatan jalur lingkar maka sangat terbuka harapan di masa yang akan datang untuk menjadikan Kecamatan Gemolong sebagai daerah transit maupun perlintasan utama dari berbagai route perjalanan dengan cara atau kebijakan meningkatkan tipe perkerasan jalur jalan-jalan alternatif, disamping memperbaiki kondisi ruas jalan utama saat ini, sehingga pola jaringan jalan lingkar dalam Kecamatan Gemolong

commit to user

menjadi lebih luas lingkungannya dan memberi peluang pengembangan ekonomi wilayahnya ke depan.

Posisi strategis Kecamatan Gemolong yang berada di perempatan berfungsi sebagai pusat transit karena keberadaannya yang persis terletak pada sumbu utama jalan propinsi yang menghubungkan antar kabupaten perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan sektor perdagangan dan jasa serta dimungkinkan untuk menggalang sinergi kebijakan dengan kabupaten tetangga maupun kecamatan tetangga yang secara geografis mempunyai sifat yang 'sama-sama agraris' serta sangat membuka peluang bagi pembentukan kerjasama pengembangan wilayah terpadu dalam suatu kawasan saling terkait dan bersinergi bagi kemajuan bersama. Kerjasama ini sangat mungkin untuk dijajagi dalam perencanaan tata ruang wilayah perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bersama dengan daerah sekitar.

4.2.2. Analisis Pola Permukiman

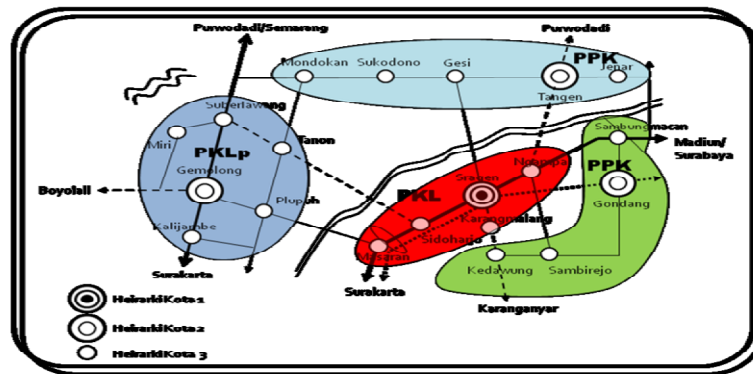
Berdasarkan penjumlahan agregat hasil analisis-analisis wilayah dan kota sebagai pusat pelayanan, dapat dilihat kecamatan yang paling berpotensi dan dapat dipilih sebagai pusat pelayanan kabupaten seperti terdapat pada lampiran 7.

Data tabel tersebut, jelas menunjukkan bahwa Kecamatan Gemolong merupakan kecamatan yang paling berpotensi dipilih sebagai pusat pelayanan kabupaten, meskipun Kecamatan Masaran secara kumulatif mempunyai hasil yang lebih baik dalam semua faktor analisis seperti ketersediaan sarana pendidikan, fungsi administrasi, sarana perekonomian maupun hasil ekonomi, tetapi secara

umum Kecamatan Gemolong mempunyai keunggulan dalam ketersediaan sarana kesehatan dan industri kecil maupun aksesibilitas.

Berdasarkan temuan hasil analisis dalam penelitian ini, jelaslah bahwa salah satu kecamatan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan administratif wilayah Kabupaten Sragen di bagian utara bengawan Solo salah satunya adalah Kecamatan Gemolong dengan hasil pembobotan sebesar 4.480 serta total prosentase matrik fungsi sebesar 205,89 sangat representatif mewakili kondisi utara bengawan yang memang kurang potensial untuk dikembangkan, karena keterbatasan sumber daya alam walaupun berdasarkan penilaian analisis di atas secara agregat, kecamatan ini masih kalah jika dibandingkan dengan Kecamatan Masaran yang mempunyai skor total 7.156 serta total prosentase matriks fungsi sebesar 245,79, tetapi masih lebih unggul jika dibandingkan dengan delapan belas kecamatan yang lain. Berarti secara ruang wilayah Kecamatan Gemolong mempunyai hirarki kota berupa ordo II berada dibawah Kabupaten Sragen yang berordo I, dengan demikian Kecamatan Gemolong dapat ditetapkan sebagai hinterland bagi Kabupaten Sragen dalam satu Bagian Wilayah Kota (BWK) berdampingan dengan Kecamatan Plupuh, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Sumberlawang, Kecamatan Miri, yang mana kecamatan-kecamatan tersebut dapat menjadi hinterland bagi Kecamatan Gemolong. Dan Gemolong diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dari daerah-daerah lain yang merupakan daerah perbatasan karena memang letak bagian wilayah kota ini berpusat di Gemolong dan berbatasan dengan kabupaten tetangga atau dalam bahasa perencanaan dikatakan hinterland dari Kecamatan Gemolong adalah daerah perbatasan.

commit to user



Gambar : 4.2.2 Hubungan hirarki antar Bagian Wilayah Kota

Selanjutnya, mengingat semua data yang digunakan dalam analisis yang telah dilakukan adalah data kecamatan, bukan khusus data ibukota kecamatannya saja, maka penentuan apakah pusat pelayanan masyarakat ditetapkan hanya di kabupaten Sragen saja atau mulai dibuka beberapa akses pelayanan di Kecamatan Gemolong mengingat jarak antara Kabupaten Sragen dengan Kecamatan Gemolong relatif jauh.

Di sini, terhadap Kecamatan Gemolong yang terpilih sebagai lokasi optimal pusat pelayanan masyarakat di sebelah utara Kabupaten Sragen perlu ditindaklanjuti dengan melakukan kajian kota alternatif ataupun revisi penyusunan tata ruang wilayah yang lebih komprehensif mengingat kedudukan Masaran, Gemolong, Plupuh dan Kalijambe mempunyai skor yang berurutan dari nomor dua sampai nomor lima sedangkan secara geografis letak lokasi tersebut bersebelahan satu dengan yang lain. Sehingga kajian yang agak melebar atau agak sedikit regional perlu segera ditindaklanjuti dengan tata ruang kawasan atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau lebih spesifik lagi.

4.2.3. Analisis Skalogram

Berdasarkan hasil analisis skalogram untuk menilai kemampuan masing-masing kecamatan dalam mengemban fungsi pusat pelayanan masyarakat sebagai salah satu peran yang juga diemban oleh suatu ibukota dari suatu wilayah administrasi pemerintahan dengan menggunakan lima variabel dan lima belas sub variabel, didapatkan hirarki tiap-tiap kecamatan yang berguna dalam mengelompokkan tiap-tiap kecamatan berdasarkan potensi/kondisi fasilitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Sragen seperti disajikan dalam lampiran 8.

Dari hasil tabel 4.2.3 dapat disimpulkan bahwa keempat kecamatan yang memiliki sejumlah fasilitas pelayanan di wilayah Kabupaten Sragen dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Kategori kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan tertinggi, merupakan hirarki I adalah Kecamatan Sragen yang sekaligus merupakan Ibu Kota Kabupaten Sragen, berarti semua pelayanan publik dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, baik itu pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan informasi, pelayanan data, pelayanan investasi, pelayanan perbankan dll, tersedia dengan baik.
2. Kategori kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan sedang, merupakan hirarki II adalah Kecamatan Masaran, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gondang adalah layak untuk menjadi kota dengan hirarki kedua, yang artinya sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten agar dilimpahkan ke Kecamatan dengan kriteria Pelayanan sedang selama ini meliputi perbankan dengan adanya beberapa

commit to user

BPR/BKK maupun kantor unit bank pemerintah maupun swasta, dibidang kesehatan ditandai dengan adanya rintisan Rumah Sakit Daerah Tipe D, Puskesmas, Klinik Bersalin dilengkapi dokter spesialis, poliklinik Desa, dokter praktek, dibidang pendidikan yang sangat menonjol dengan munculnya Sragen Bilingual Boarding School yang bekerjasama dengan Pemerintah Turki yang siswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal yang selama ini dipandang belum dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap Kecamatan dengan tingkat pelayanan sedang adalah pemberian kemudahan perijinan, perijinan yang diberikan baru meliputi pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Perijinan pertambahan rakyat manual/tradisional sehingga kedepan perlu sebuah terobosan baru seiring dengan kemajuan Elektronik Government di Kabupaten Sragen dengan pendelegasian kemudahan perijinan yang dilengkapi dengan payung hukum bagi Kecamatan Gemolong. Selain itu mengingat Kecamatan Masaran, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Kalijambe dan Kecamatan Plupuh secara geografis letaknya bersebelahan dan semua mempunyai kedekatan dengan Kota Solo maka kedepannya perlu kajian khusus untuk keempat wilayah tersebut.

3. Kategori kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan rendah, merupakan hirarki III adalah terdiri dari Kecamatan Kedawung, Sambirejo, Sambungmacan, Ngrampal, Karangmalang, Sidoharjo, Tanon, Miri, Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi, Tangen dan Jenar, kota-kota kecamatan ini kedepannya diharapkan mampu menjadi hinterland bagi kecamatan-kecamatan yang mempunyai hirarki lebih tinggi

commit to user

Keberadaan sistem pusat-pusat pelayanan hirarki II dan III diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kecamatan hingga ke pedalaman sehingga dapat mengurangi beban pelayanan untuk pusat pelayanan pada hirarki yang lebih tinggi dan ketersediaan fasilitas pelayanan juga dapat dibangun sesuai dengan hirarki pusat pelayanan yang bersangkutan. Dalam hal ini di semua pusat-pusat pelayanan, perlu dilakukan penataan ruang dan peruntukan lahan serta dibangun fasilitas umum dan sarana serta prasarana yang lebih memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Rondinelli mengemukakan bahwa kebijakan pengembangan daerah harus dititikberatkan pada peningkatan produktivitas agrikultur dan pemasaran barang-barang agrikultur, mendorong skala kecil proses agro-industri dan menggolongkan dasar ekonomi pusat pasar. Kegiatan harus diorganisasi untuk menghubungkan pasar kota dengan penyediaan daerah-daerah pedusunan/pedalaman dan untuk membuat pelayanan, fasilitas, dan input yang terpenting untuk produksi agrikultur dan pemasaran dengan mudah dapat diperoleh penduduk di daerah pedusunan pada tingkat kehidupan yang rendah atau tersebar di seluruh daerah. Penanaman modal dalam pertanian ke pasar dan seluruh jalan-jalan sangat penting untuk melingkupi daerah pedusunan dan pusat pasar

4.2.4. Analisis Location Quotients

Analisis *Location Quotient* (*LQ*) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk sektor basis atau berpotensi dan manakah yang termasuk bukan merupakan sektor basis. Hal tersebut dapat terlihat jika *LQ* menunjukkan angka lebih dari satu ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sector basis. Kemudian jika hasil menunjukkan angka kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti

commit to user

sektor tersebut bukan merupakan sektor basis. Hasil perhitungan *Location Quotient* (*LQ*) Kecamatan Gemolong selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat pada tabel 4.2.4 di seperti bawah ini, selengkapnya lihat lampiran 9:

Tabel : 4.2.4
Hasil Analisis *Location Quotient* Kecamatan Gemolong, Tahun 2005 – 2009

No	Sektor	LQ Kecamatan Gemolong					Rerata
		2005	2006	2007	2008	2009	
1.	Pertanian	0.8803	0.8654	0.8677	0.8640	0.8683	0.8691
2.	Pertambangan dan penggalian	0.0926	0.0912	0.0918	0.0900	0.0897	0.0911
3.	Industri Pengolahan	0.9170	0.9014	0.8894	0.8819	0.8714	0.8922
4.	Listrik dan Air Minum	1.1777	1.1701	1.2110	1.1992	1.2178	1.1952
5.	Bangunan/Konstruksi	1.2222	1.2131	1.2263	1.2227	1.2179	1.2204
6.	Perdagangan Hotel & Restoran	1.1298	1.1554	1.1542	1.1505	1.1553	1.1490
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0.9137	0.9197	0.9127	0.9110	0.8978	0.9110
8.	Keuangan, persewahan dan Jasa perusahaan	1.1840	1.1987	1.2209	1.2433	1.2432	1.2180
		1.2143	1.2315	1.2232	1.2347	1.2260	1.2260
9.	Jasa-jasa	0.9702	0.9718	0.9775	0.9775	0.9764	0.9747

Sumber : PDRB Kabupaten Sragen Th 2009 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Gemolong memiliki 5 sektor basis, sektor- sektor tersebut yaitu :

- a. Sektor Listrik dan Air Minum mempunyai LQ sebesar 1.1952; sektor ini sangat menonjol karena sangat terkait dengan sektor bangunan dan konstruksi, sehingga saat ini Kecamatan Gemolong merupakan Kecamatan yang sangat dekat dengan Solo yang mempunyai tingkat aksesibilitas yang sangat nyata, akhirnya migran- migran yang datang ke solo untuk mengadu nasib banyak bermukim di Kecamatan Gemolong karena nilai nominal tanah relative lebih murah, maka banyak dibangun permukiman-permukiman baru, sarana – sarana wisata, mini market, super market, warung, rumah makan di sepanjang jalan yang

commit to user

menghubungkan antara Sragen-Boyolali dan sepanjang bantaran rel kereta api serta jalan Propinsi yang menghubungkan Kabupaten Grobogan dan Solo, sehingga kebutuhan akan listrik dan air minum harus dilayani dengan baik.

b. Sektor Bangunan/ Konstruksi mempunyai LQ sebesar 1.12204

Sangat dekat keterkaitan antara Sektor Listrik dan Air minum dengan Sektor Bangunan/ Konstruksi karena saat ini pembangunan permukiman, pembangunan sarana prasarana perekonomian, pembangunan rumah sakit tipe C, klinik bersalin, pom bensin, warung-toko-ruko sepanjang jalan Solo-Grobogan dan Sragen-Boyolali, pembangunan Sragen Bilingual Boarding School yang siswanya berasal dari seluruh Indonesia, RSBI, sarana-sarana pendidikan, water boom, kolam renang yang semuanya terbangun pada akhir-akhir ini turut menyumbangkan kenaikan Sektor Bangunan dan Konstruksi di Kecamatan Gemolong.

c. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai LQ sebesar 1.1490

Pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Kecamatan Gemolong tumbuh seiring dengan pesatnya kegiatan industri, pendidikan, wisata dan pemukiman yang telah ada. Sektor ini tumbuh seiring dengan aktivitas manusia yang menuntut tersedianya kebutuhan primer dan sekunder maupun tersier sehingga banyak sekali terbangun ruko, warung, toserba maupun retail-retail untuk memenuhi kebutuhan mereka yang dampaknya akan menimbulkan bangkitan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya.

d. Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan mempunyai LQ sebesar 1.2180 dan LQ sebesar 1.12260.

Peningkatan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terjadi karena sebagai ikutan dari sektor basis yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan kebutuhan primer dan sekundair, semakin banyak pergeseran dari basis pertanian ke basis non pertanian akan semakin meningkatkan kebutuhan manusia akan kehadiran jasa, salah satunya ditandai dengan kehadiran beberapa cabang atau unit-unit pelayanan perbankan maupun koperasi-koperasi yang memberikan layanan kepada masyarakat sekitar Gemolong.

Sedangkan bagi sektor yang merupakan sektor bukan basis selama periode tahun 2005-2009 terdapat 4 sektor yaitu sektor Pertanian LQ sebesar 0.8691; sector Pertambangan dan penggalian dengan rata-rata LQ sebesar 0,0911; Sektor Industri Pengolahan dengan LQ rata-rata sebesar 0.8922; sektor Pengangkutan & Komunikasi dengan LQ rata-rata sebesar 0.9110.

Walaupun sektor basis merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gemolong, namun sektor non basis harus tetap dikembangkan untuk menjadi sektor basis baru ditunjang dengan adanya sektor basis yang telah ada.

4.2.5. Analisis Shift Share

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi kecamatan dibandingkan dengan perekonomian kabupaten. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian

commit to user

daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar. Untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan analisis *Shift Share* digunakan variabel penting seperti tenaga kerja, penduduk dan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel pendapatan yaitu PDRB tahun 2006 sampai dengan 2009 untuk menguraikan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gemolong.

Pertumbuhan PDRB total (G) dapat diuraikan menjadi komponen *Shift* dan Komponen *Share* yaitu:

- a. Komponen Kabupaten *Share* (N) adalah banyaknya pertambahan PDRB seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Kecamatan selama periode yang tercakup dalam studi.
- b. Komponen *Proportional shift* (P) mengukur besarnya *net shift* Kecamatan yang diakibatkan oleh perubahan komposisi sektor-sektor PDRB Kota. Apabila $P_j > 0$ artinya Kecamatan yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Kabupaten tumbuh lebih cepat dan apabila $P_j < 0$ berarti Kecamatan yang bersangkutan berspesialisasi pada sektor yang ditingkat Kabupaten tumbuh lebih lambat atau bahkan sedang merosot.
- c. Komponen *Differential shift* (D) mengukur besarnya *shift netto* yang diakibatkan oleh sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat di daerah yang bersangkutan dibandingkan dengan tingkat Kecamatan yang disebabkan oleh faktor-faktor lokasional. Daerah yang mempunyai keuntungan lokasional, seperti sumber daya yang baik akan mempunyai *differential shift component* positif

($D_j > 0$), sebaliknya daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasional akan mempunyai *differential shift component* ($D_j < 0$).

Tabel 4.2.5.a. Tabel analisis Shift Share Kecamatan Gemolong

Pertumbuhan ®			Komponen (juta rupiah)			
Rn	Rin	Rij	Nij	Mij	Cij	Dij
	4,00%	2,75%	11724,68	-3280,01	-2.631,05	5813,611
	5,91%	-4,11%	11,55548	0,741456	-20,84	-8,546136
	6,18%	-0,49%	7890,255	889,8753	-9.479,09	-698,9615
	7,11%	6,76%	541,0094	151,6119	-34,03	658,59274
	6,08%	15,46%	1974,071	187,0934	3.332,47	5493,6323
	6,15%	9,36%	7840,454	841,9058	4.535,89	13218,252
	5,12%	4,97%	1143,618	-89,2981	-31,41	1022,9097
	6,33%	7,77%	1837,346	256,8441	477,78	2571,9715
	7,67%	8,49%	5505,129	2097,859	816,72	8419,711
5,55%	5,55%	50,97%	38468,11	1056,619	314.599,61	354124,34

Sumber : data olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2005-2009 komponen rerata pertumbuhan PDRB total Kabupaten Sragen adalah 5,55%, atau sebesar 1.686.497,143 padahal banyaknya pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Kecamatan Gemolong (Mij) adalah sebesar 76.962,62 ini berarti terjadi penyimpangan positif sebesar 1.609.534,523 dan ini menunjukkan pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Kecamatan Gemolong. Pada kedua komponen Mij dan Nij mengalami peningkatan, dengan penyimpangan yang semakin meningkat pula menjadi sebesar 1056,619 menjadi sebesar 38468,11 yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen masih lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kecamatan Gemolong. Kedua komponen pertumbuhan

commit to user

ekonomi total Kecamatan Gemolong (Mij) maupun komponen pertumbuhan ekonomi total Kabupaten Sragen (Nij) sama-sama mengalami penurunan. Dari tabel diatas dilihat dari hasil per sektor pertumbuhan rata-rata. Di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari setiap sektor dan yang paling rendah adalah dari sektor Jasa-jasa (7,67%) dan yang tertinggi terdapat pada sektor Pertanian (4,00%) namun penyimpangan yang terjadi justru semakin menurun di Kecamatan Gemolong yaitu terdapat dalam sektor pertambangan dan penggalian (-4,11%) dan sektor Industri Pengolahan (-0,49%) yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen masih lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kecamatan Gemolong. Bukti dari penyimpangan positif tersebut dapat dilihat pada lampiran 10. Dari lampiran 10 dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan PDRB Kecamatan Gemolong selalu di atas rata-rata dari persentase pertumbuhan PDRB Kabupaten Sragen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.

V.1. KESIMPULAN.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kecamatan Gemolong berdasarkan aksesibilitasnya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat menjadi pusat pelayanan di sebelah utara Bengawan Solo karena kedekatannya dengan kabupaten Sragen, Boyolali/ Salatiga, Grobogan maupun Solo, serta karena secara geografis, letaknya berada di perempatan jalur jalan utama Solo-Grobogan dan jalan alternatif utama Sragen – Salatiga/ Semarang.
2. Jalan lokal primer kondisinya belum memungkinkan untuk transportasi kendaraan besar dengan intensitas yang padat akibatnya ialah sangat terbatasnya dukungan jaringan jalan alternatif bagi aktivitas penduduk di Kecamatan Gemolong . Oleh karena itu, umumnya pergerakan orang, barang, dan jasa di Kecamatan Gemolong tetap saja memanfaatkan jaringan jalan utama yang sudah ada dengan memperhatikan faktor kedekatan jarak.
3. Kecamatan Gemolong berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan wilayah karena hasil skor pembobotan menunjukkan nilai sebesar 4.480 serta total prosentase matrik fungsi sebesar 205,89, termasuk dalam kategori kecamatan yang memiliki fasilitas pelayanan sedang, merupakan kecamatan dengan hirarki II
4. Kecamatan Gemolong mempunyai 5 (lima) sektor basis, yaitu : a) Sektor Listrik dan Air Minum mempunyai LQ sebesar 1.1952; b). Sektor Bangunan/ Konstruksi mempunyai LQ sebesar 1.12204, c). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran mempunyai LQ sebesar 1.1490, d). Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan mempunyai LQ sebesar 1.2180 dan LQ sebesar 1.12260.

5. Dari Analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari setiap sektor dan yang paling rendah adalah dari sektor Jasa-jasa (7,67%) dan yang tertinggi terdapat pada sektor Pertanian (4,00%), hal ini bertolak belakang dengan Kecamatan Gemolong yang mempunyai pertumbuhan sektor pertanian selalu menurun sedangkan sektor jasa selalu meingkat, hal ini disebabkan kondisi geografis Kecamatan Gemolong yang tidak sesuai untuk pertanian.

V.2. Saran.

1. Perlu ditindaklanjuti dengan revisi Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Ibu Kota Kecamatan Gemolong karena sudah banyak sekali terjadi penyimpangan tata ruang tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan yang berada di atasnya, terutama sekali penentuan kawasan pendidikan, kawasan industri, sub terminal, terminal angkutan, kawasan wisata, kawasan perdagangan dan jasa, jalan lingkar, serta koordinasi yang intens antara kecamatan-kabupaten dan PT KAI dalam hal sempadan rel kereta api dengan palang pintunya.
2. Melakukan kajian kota alternatif seperti pembuatan Kawasan Pengembangan Terpadu, ataupun revisi penyusunan tata ruang kawasan yang lebih komprehensif mengingat kedudukan Masaran, Gemolong, Plupuh dan Kalijambe mempunyai skor yang berurutan dari nomor dua sampai nomor lima sedangkan secara geografis letak lokasi tersebut bersebelahan satu dengan yang lain.
3. Gemolong layak untuk jadi kota dengan ordo II, yang mempunyai pelayanan sedang, sehingga seiring dengan pelaksanaan E-Government di Kabupaten Sragen agar bisa di delegasikan kemudahan pelayanan dan perijinan yang ditunjang dengan payung hukum yang memadai diantaranya meliputi sebagian non perijinan online seperti : Pembuatan

commit to user

Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Kematian, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Akte Perceraian yang perijinan meliputi Ijin Keramaian, Ijin Pertambangan Tradisional Galian C, Ijin Usaha skala mikro dan rumah tangga, ijin pendirian warung makan/ toko, ijin usaha peternakan skala kecil, ijin pendirian keramba apung, ijin penutupan jalan, dll.

3. a. Sektor Pertanian agar terjadi peningkatan pendapatan petani agar pertanian padi hanya ditanam pada masa tanam I, sedangkan pada masa Tanam II, III diganti dengan tanaman hortikultura yang tidak membutuhkan banyak pasokan air, seperti Cabe, Semangka, Melon, Merica, dll karena keterbatasan sumber daya air permukaan dan jaringan irigasi.
- b. Sektor pertambangan yang selama ini hanya mengambil bahan galian untuk di jual agar dilakukan pelatihan pengolahan bahan galian menjadi bahan jadi atau setengah jadi sehingga mempunyai nilai tambah bagi penduduk serta meminimalkan kerusakan lahan.
- c. Perlu perencanaan serius dari pemerintah dalam melakukan perbaikan infrastruktur terutama sekali sarana transportasi yang selama ini hanya mengandalkan jalan arteri utama agar dioptimalkan perbaikan dan pengembangan jalan kolektor agar terhubung dengana jalan arteri primair dan sekundair dalam rangka mendukung titik-titik industri rumah tangga maupun industri kecil yang berada di sekitar Gemolong, karena wilayah tersebut sangat dikenal dengan ribuan home industri batik dan meubeler yang show roomnya bertebaran di Solo.
- d. Sektor-sektor yang sudah basis agar terus ditingkatkan dimana setiap pelaksanaannya agar tetap memperhatikan RUTRK-IKK Gemolong guna menjaga harmonisasi kota.

commit to user